

# LAPORAN KINERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



**2022**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**LAPORAN KINERJA**

---

**2022**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

The background features a dark blue gradient at the top, transitioning into a light blue area at the bottom. A large, abstract shape composed of several triangles is overlaid on the bottom half. The triangles are colored in shades of lime green, dark blue, and black, with thin gold borders separating them.

## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yaitu Tuhan Semesta Alam karena atas rahmat dan karunia yang melimpah Kita masih diberikan waktu untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022. Berbagai macam kendala dan tantangan sepanjang tahun 2022 dapat dilewati dan digantikan dengan capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan.

Tahun 2022, BIG masih dihadapkan dengan suasana kerja di tengah pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan dan kondisi perekonomian global yang mengancam perekonomian domestik. Namun, BIG senantiasa berupaya dan tetap optimis untuk mencapai target kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Informasi Geospasial (IG). Dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi sepanjang tahun 2022 juga ikut memengaruhi terhadap perumusan strategi yang harus BIG ambil untuk perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja BIG sebagai salah satu penyelenggara negara yang dibiayai oleh APBN dan bertanggung jawab kepada Presiden atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 tetap berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini diuraikan mengenai rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan berbagai capaian lain yang diraih BIG pada tahun 2022.

Sebagai informasi tambahan bahwa penyusunan dan implementasi kerangka kinerja yang dilakukan BIG tahun 2022 merupakan periode ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2020-2024. Sehingga dalam beberapa Sasaran Strategis (SS) terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Kemenpan dan RB bahwa setiap kinerja yang dihasilkan K/L harus berorientasi *outcome* dan *impact* bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara umum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, BIG mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,69%. Nilai kinerja tersebut merupakan nilai kinerja dari 4 (empat) SS yang diterjemahkan menjadi 7 (tujuh) IKU. Dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan nilai kinerja sebesar 5,16%. Peningkatan NKO tersebut menjadi bukti bahwa BIG dengan segala daya dan upaya bersama dapat terus bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan kelembagaan dalam berbagai kondisi.

Akhir kata, Saya sebagai pimpinan BIG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja BIG pada tahun-tahun berikutnya. Semoga Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan sebagai wujud pertanggungjawaban BIG untuk senantiasa mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik.

Cibinong, 20 Februari 2023

Kepala Badan Informasi Geospasial,



Muh Aris Marfai

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Informasi Geospasial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cibinong, 14 Februari 2023  
Inspektur,

*ditandatangani secara elektronik*

Habib Subagio  
NIP. 19741202 200212 1 006



**FORMULIR CHECK REVIU  
 ATAS LAPORAN KINERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	PERNYATAAN		CHECK LIST
<b>I</b>	<b>FORMAT</b>	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Ya
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Ya
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Tidak
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Tidak
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya
<b>II</b>	<b>MEKANISME PENYUSUNAN</b>	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Ya
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Tidak
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Ya
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ya
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Tidak
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	Tidak
<b>III</b>	<b>SUBSTANSI</b>	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Tidak
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	Ya

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Bekalang .....	1
I.2 Maksud dan Tujuan.....	2
I.3 Tugas dan Fungsi BIG .....	3
I.4 Struktur Organisasi .....	3
I.5 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran .....	6
I.6 Potensi dan Permasalahan.....	9
I.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
II.1 Rencana Strategis.....	11
II.2 Penetapan Kinerja BIG Tahun 2022 .....	14
II.3 Alokasi Anggaran .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
III.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
III.2 Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran Strategis.....	24
III.2.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang Berkualitas dan Siap Pakai Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional .....	24
III.2.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional.....	33

III.2.3	Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Infrastruktur Informasi Geospasial yang Berkualitas untuk Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional.....	42
III.2.4	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.....	49
III.3	Kinerja Anggaran.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tabel Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 (Semula Menjadi Pasca Revisi).....	15
Tabel 2. 2	Alokasi Anggaran BIG Tahun 2022 (dalam ribuan rupiah) .....	18
Tabel 3. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2022 .....	22
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja IKU 1 pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 .....	25
Tabel 3. 3	Capaian Kegiatan SRGI Tahun 2022.....	26
Tabel 3. 4	Capaian Kinerja IKU 2 pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 .....	30
Tabel 3. 5	Penghitungan Penggunaan Layanan SRGI Horizontal dan Vertikal Tahun 2022 .....	31
Tabel 3. 6	Capaian Kinerja IKU 1 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 .....	34
Tabel 3. 7	Kegiatan Penyelenggaraan IGT Strategis Tahun 2022.....	36
Tabel 3. 8	Capaian Kinerja IKU 2 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 .....	38
Tabel 3. 9	Capaian Kinerja IKU 3 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 .....	41
Tabel 3. 10	Penghitungan Capaian Pemanfaatan IGT Strategis yang Diselenggarakan PPIT .....	41
Tabel 3. 11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022.....	43
Tabel 3. 12	Capaian Indeks Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar dan SDM IG.....	44
Tabel 3. 13	Capaian Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG .....	48
Tabel 3. 14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022.....	49
Tabel 3. 15	Pagu dan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2022 per Kegiatan.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Berdasarkan Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2020 .....	4
Gambar 1. 2	Komposisi SDM BIG Tahun 2022 Berdasarkan Sebaran UKE I....	7
Gambar 1. 3	Komposisi SDM BIG Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Gambar 1. 4	Pagu Anggaran BIG Tahun 2022 Berdasarkan Program .....	9
Gambar 2. 1	Keselaran Visi dan Misi BIG dalam Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.....	13
Gambar 2. 2	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis BIG 2020-2024 .....	14
Gambar 3. 1	Tampilan Capaian IKU BIG Tahun 2022 pada Aplikasi e-performance .....	20
Gambar 3. 2	Tampilan Capaian IKU BIG Setiap Triwulan Tahun 2022 pada Aplikasi e-performance .....	20
Gambar 3. 3	Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG Tahun 2018-2022 .....	21
Gambar 3. 4	Lokasi Kegiatan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (Orthorektifikasi).....	28
Gambar 3. 5	Dokumen Gazeter Republik Indonesia (GRI) Tahun 2022 .....	29
Gambar 3. 6	Tampilan Laman Situs Layanan SRGI (srgi.big.go.id).....	31
Gambar 3. 7	Kegiatan Uji Implementasi Lapangan Standar Proses penyelenggaraan IG DTA Danau .....	35
Gambar 3. 8	Road Map Penyelenggaraan Atlas oleh BIG Tahun 2020-2024 ...	36
Gambar 3. 9	(kiri) Buku Pedoman Penyusunan Kemampuan Lahan, (kanan) Contoh Peta Kemampuan Lahan .....	38
Gambar 3. 10	Dokumen Pedoman Pembinaan Pemanfaatan DG dan IG untuk Perencanaan Pembangunan .....	39
Gambar 3. 11	Dokumentasi Kegiatan Klinik Pembinaan Penyusunan Peta Dasar untuk RTRW .....	40
Gambar 3. 12	Kegiatan Uji Implementasi Standar Penyelenggaraan IG Tahun 2022 .....	44
Gambar 3. 13	Kegiatan Pembinaan JF Surveyor Pemetaan Tahun 2022.....	45
Gambar 3. 14	Penganugerahan Bhumandala Award - Inovasi Pemanfaatan IG Tahun 2022 .....	46
Gambar 3. 15	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Kajian Rekomendasi Efektivitas Kebijakan Satu Peta Dalam Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan .....	46
Gambar 3. 16	Perkembangan Nilai RB BIG Tahun 2017-2021.....	50
Gambar 3. 17	Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah).....	52
Gambar 3. 18	Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018-2022 .....	53

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan APBN secara transparan dan penuh tanggung jawab. Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 berisi tentang capaian kinerja serta kendala yang dihadapi selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan periode ketiga implementasi Rencana Strategis (Renstra) BIG 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 1 Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja BIG pada tahun 2022 dapat dikatakan baik dengan sebagian besar target indikator kinerja terpenuhi. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang dapat diukur keberhasilannya melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BIG tahun 2022 adalah sebesar 107,69% dan termasuk dalam kategori baik.

Adapun nilai capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang Berkualitas dan Siap Pakai Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:
  - Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Target yang ditetapkan adalah sebesar 21,31% dengan realisasi sebesar 28,44%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 133,46%. Karena terdapat aturan mengenai batas nilai maksimal suatu kinerja, maka nilai capaian pada IKU ini adalah 120%; dan
  - Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Target yang ditetapkan adalah sebesar 9,08% dengan realisasi sebesar 11,83%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 130,36%.

Karena terdapat aturan mengenai batas nilai maksimal suatu kinerja, maka nilai capaian pada IKU ini adalah 120%.

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:
  - Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Target yang ditetapkan adalah sebesar 73,79% dengan realisasi sebesar 74,16%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 100,5%;
  - Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang. Target yang ditetapkan adalah sebesar 21,31% dengan realisasi sebesar 21,81%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 102,35%; dan
  - Persentase (%) IGT strategis yang dimantaatkan oleh K/L/P. Target yang ditetapkan adalah sebesar 63,10% dengan realisasi sebesar 68,45%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 108,48%
3. Sasaran Strategis III: Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:
  - Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas. Target yang ditetapkan adalah sebesar 7,62 Indeks (skala likert 1-10) dengan realisasi sebesar 8,36 sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 109,71%
4. Sasaran Strategis IV: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan IKU:
  - Nilai Reformasi Birokrasi. Target yang ditetapkan adalah sebesar 76 (nilai RB) dengan realisasi sebesar 74,02 sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 97,39%.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta sasaran strategis yang telah ditetapkan, tahun 2022 BIG mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp495.119.418.000. Namun, karena adanya

kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*), pagu anggaran BIG menjadi Rp452.245.199.000. Sampai akhir periode T.A. 2022, BIG merealisasikan anggaran sebesar Rp406.248.130.224,- atau 89,83%.

Badan Informasi Geospasial (BIG) senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik dalam fungsinya sebagai penyelenggara di bidang informasi geospasial. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih membayangi serta kondisi perekonomian global yang mengancam perekonomian domestik, BIG tetap dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan baik. Di sisi lain, BIG terus melakukan perbaikan dan menyempurnakan kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Maksud dan Tujuan**
- 1.3 Tugas dan Fungsi BIG**
- 1.4 Struktur Organisasi**
- 1.5 Sumber Daya Manusia**
- 1.6 Potensi dan Permasalahan**
- 1.7 Sistematika Penyusunan**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mendetailkan pelaksanaan Perpres tersebut, maka dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari entitas pemerintah, BIG tunduk dan patuh melaksanakan peraturan tersebut dengan secara rutin melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dihasilkan dan setiap rupiah yang digunakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial merupakan dasar hukum terbentuknya BIG dengan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Secara teknis pertanggungjawaban kegiatan, BIG dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Perpres 127 Tahun 2015. Selanjutnya kedua Perpres tersebut dicabut dan tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial.

Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan BIG kepada peraturan perundang-undangan, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaporkan capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Laporan Kinerja BIG tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BIG atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BIG selama tahun 2022 serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BIG Tahun 2020-2024.

Selain itu, Laporan Kinerja BIG tahun 2022 ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga diharapkan penyusunan laporan kinerja ini dapat menjadi alat kendali untuk mengetahui pencapaian kinerja BIG tahun 2022 yang belum maksimal dan sebagai sarana untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang bagi setiap unit kerja di lingkungan BIG.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja BIG tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran BIG. Selain itu, berdasarkan Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja BIG tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja BIG selama tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.



### **I.3 Tugas dan Fungsi BIG**

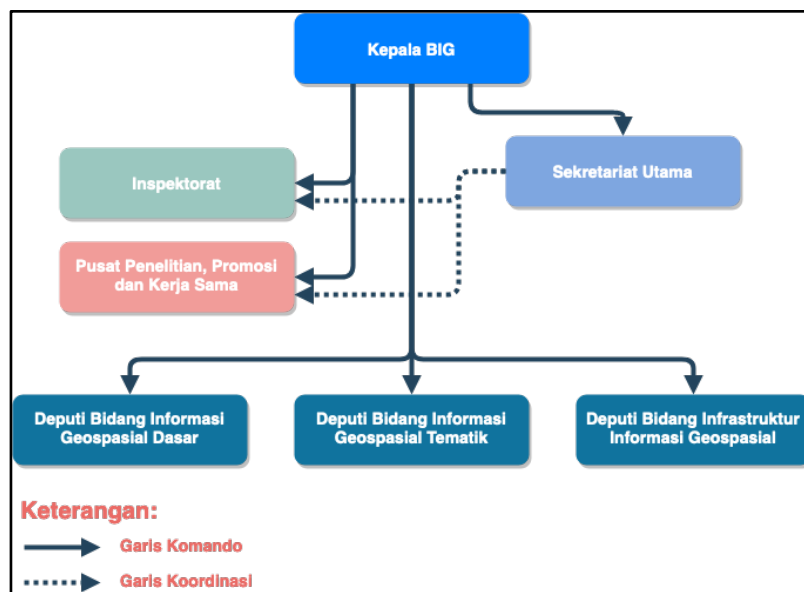
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial yang mencabut Perpres Nomor 94 Tahun 2011 dan Perpres 127 Tahun 2015 tentang Badan Informasi Geospasial, dijelaskan bahwa BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, BIG menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

### **I.4 Struktur Organisasi**

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial, BIG telah mengajukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, hingga saat laporan kinerja ini dibuat, usulan tersebut masih dalam proses penelaahan. Oleh karena itu, hingga saat ini BIG masih menggunakan SOTK lama, sebelum Perpres 128 Tahun 2022 diundangkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial, telah ditetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, maka diperlukan struktur organisasi untuk mendukung peran strategis BIG dalam mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial. Maka disusunlah struktur organisasi BIG yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Berdasarkan Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2020

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Kepala BIG dibantu dengan 3 (tiga) Unit Kerja Eselon (UKE) I yang membidangi program penyelenggaraan informasi geospasial dan 1 (satu) UKE I yang membidangi program dukungan manajemen. Pendetilan setiap UKE I dan unit kerja dibawahnya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Utama

membawahi 2 (dua) UKE II, yaitu Biro Umum dan Keuangan, dan Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum.

2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar. Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar membawahi 4 (empat) UKE II, yaitu Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai serta Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik. Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik membawahi 2 (dua) UKE II, yaitu Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik serta Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas.

4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial. Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial membawahi 2 (dua) UKE II, yaitu Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial serta Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.

5. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di BIG. Inspektorat secara struktur berkedudukan di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama.

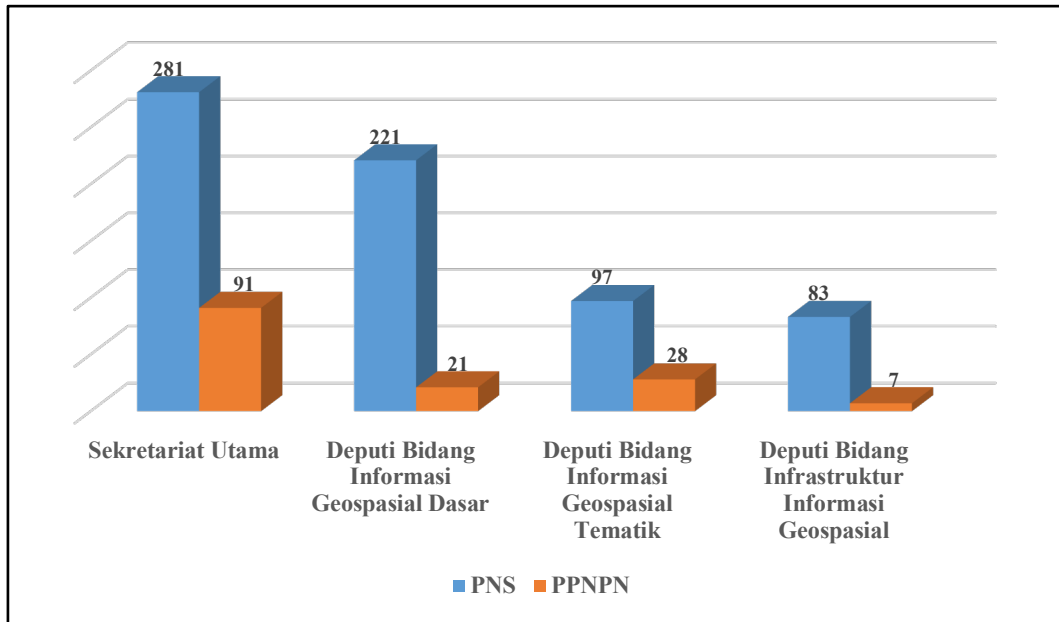
## 6. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIG, berkedudukan di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, promosi, kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama mengoordinasikan UKE III yang secara kedudukan langsung di bawah Kepala, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial serta Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial.

Pada tahun 2020, dengan terbitnya Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, terdapat perubahan struktur organisasi UKE III dan IV di lingkup BIG menjadi jabatan fungsional. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa BIG telah berhasil melakukan penyederhanaan organisasi/birokrasi sesuai arahan dari Presiden RI untuk mencapai visi Indonesia 2045.

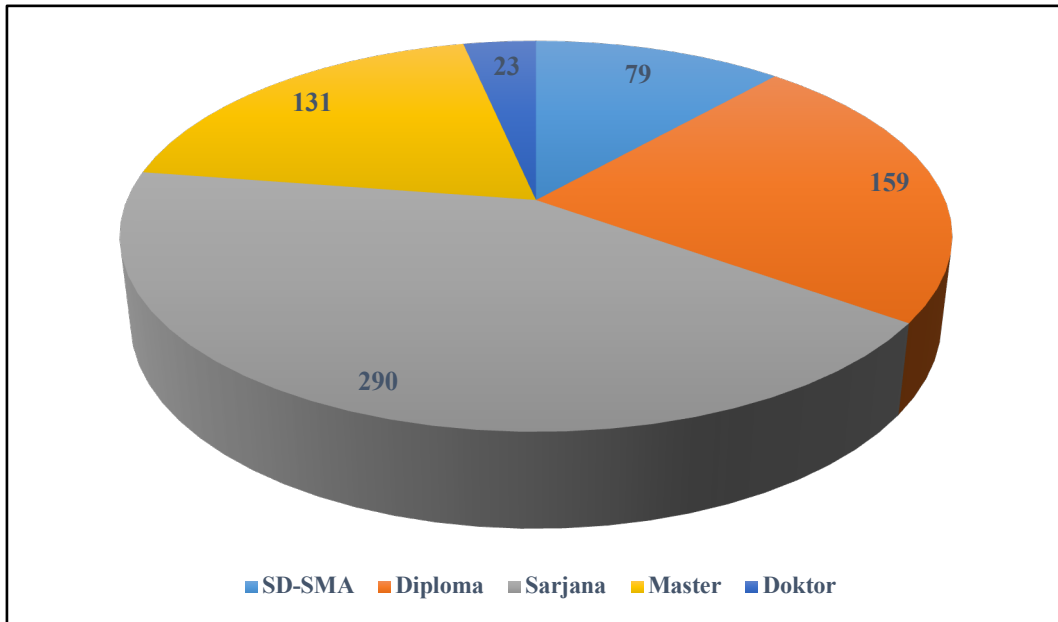
### **I.5 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran**

Dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai penyedia, pengelola dan memaksimalkan pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, BIG ditunjang oleh SDM yang memadai, kompeten dan professional. Pegawai BIG terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah pegawai BIG sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 856 orang, yang terdiri dari 683 orang berstatus sebagai PNS dan 173 orang berstatus sebagai PPNPN yang tersebar pada 4 (empat) UKE I. Dinamika jumlah pegawai BIG dikarenakan adanya pegawai yang menyelesaikan masa kerjanya atau purnabakti (pensiun) pada tahun 2022. Keragaman SDM BIG tahun 2022 berdasarkan jumlah pegawai setiap UKE I dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Komposisi SDM BIG Tahun 2022 Berdasarkan Sebaran UKE I

Pegawai atau SDM merupakan aset utama dalam sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mendukung hal tersebut. Setiap tahun BIG fokus pada peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM sehingga selalu dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun dokumen perencanaan secara nasional seperti RPJMN dan RPJP. Pada tahun 2022 komposisi pegawai BIG (PNS) berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebanyak 23 orang (3,37%) berpendidikan Doktor (S3), 131 orang (19,21%) berpendidikan Master (S2), 290 orang (42,52%) berpendidikan Sarjana (S1), 159 orang (23,31%) berpendidikan Diploma (DI-DIV) dan sebanyak 79 orang (11,58%) berpendidikan SD-SMA. Sementara tingkat pendidikan untuk pegawai BIG dengan status PPNPN, yaitu sebanyak 80 orang berpendidikan Sarjana, 13 orang berpendidikan Diploma dan 54 orang berpendidikan SMA. Komposisi SDM BIG tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Komposisi SDM BIG Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

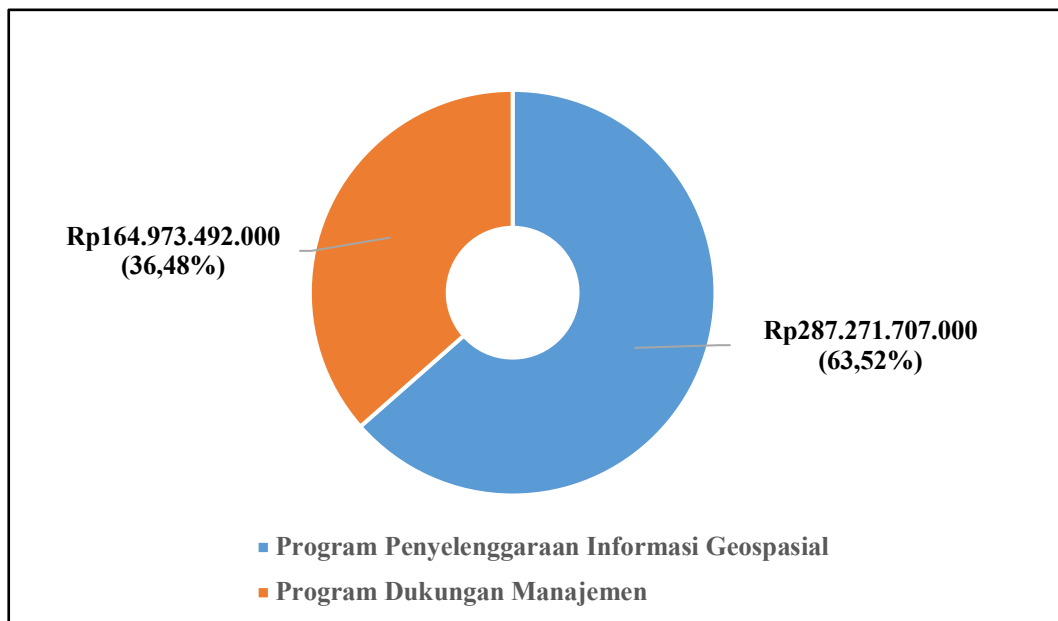
Pegawai BIG khususnya yang berstatus PNS diarahkan pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diembannya. Pada tahun 2022 sebanyak 513 pegawai (PNS) atau 75,22% menduduki JFT dengan komposisi terbanyak menempati jabatan Surveyor Pemetaan dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BIG pada bidang informasi geospasial.

Seiring dengan semangat penyederhanaan birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, pada pertengahan tahun 2020 BIG melakukan penyederhanaan dari 31 jabatan menjadi 3 jabatan Eselon III (Administrator) dan penghapusan seluruh jabatan Eselon IV (Pengawas). Penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup pemerintahan merupakan arahan langsung dari Presiden RI agar mempermudah proses komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan dan mendorong fleksibilitas organisasi dalam merespons kebutuhan masyarakatn secara cepat.

Pada Tahun 2022, BIG mendapatkan pagu alokasi awal sebesar Rp495.119.418.000. Pagu anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen. Karena kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil karena

mempertimbangkan situasi politik internasional serta ancaman resesi global dan pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L.

Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2022, sehingga pagu akhir yang dikelola oleh BIG adalah sebesar Rp452.245.199.000. Pagu Anggaran BIG Tahun 2022 per jenis Program BIG dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Pagu Anggaran BIG Tahun 2022 Berdasarkan Program

## I.6 Potensi dan Permasalahan

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang perubahan garis koordinasi BIG dari Kementerian Riset dan Teknologi menjadi dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan informasi geospasial adalah hal mendasar sebelum melakukan perencanaan pembangunan. Peran BIG menjadi lebih terlihat semenjak berada dibawah koordinasi Bappenas dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan pembangunan tidak lepas dari kebutuhan terhadap peta dasar secara khusus dan informasi geospasial secara umum untuk menentukan lokasi yang menjadi fokus percepatan pembangunan.

Badan Informasi Geospasial mendapat tugas khusus dari Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta, kemudian disempurnakan pada Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan tersebut menuntut BIG sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan IGD untuk menyediakan data dasar dalam rangka keperluan pemetaan tematik di Indonesia. Kebijakan Satu Peta hadir sebagai jawaban atas tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral dan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang yang selama ini terjadi. Oleh karena itu potensi ini yang menjadi acuan bagi BIG untuk melakukan percepatan penyediaan data dasar seluruh Indonesia dalam jangka waktu 2020-2024.

## **I.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BIG tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada tugas, fungsi dan struktur organisasi BIG, potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, dan sistematika penyusunan laporan kinerja;
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis BIG 2020-2024, ringkasan perjanjian kinerja tahun 2022 dan targetnya, serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja BIG tahun 2021, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta prestasi dan kerja sama yang dilaksanakan BIG selama tahun 2022; dan
4. **Bab IV Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BIG tahun 2022 serta tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan BIG untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.



# **BAB 2**

## **PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Rencana Strategis**

**2.2 Penetapan Kinerja BIG**

**2.3 Alokasi Anggaran**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **II.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan BIG untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BIG Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.

Penyusunan Renstra BIG Tahun 2020-2024 mempertimbangkan berbagai kondisi yang terjadi baik dalam lingkungan strategis nasional maupun lingkungan strategis global. Pemanfaatan informasi geospasial yang semakin terlihat untuk perencanaan pembangunan menjadikan BIG sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran strategis. Sehingga BIG dituntut untuk memberikan kontribusinya untuk menyediakan data dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011.

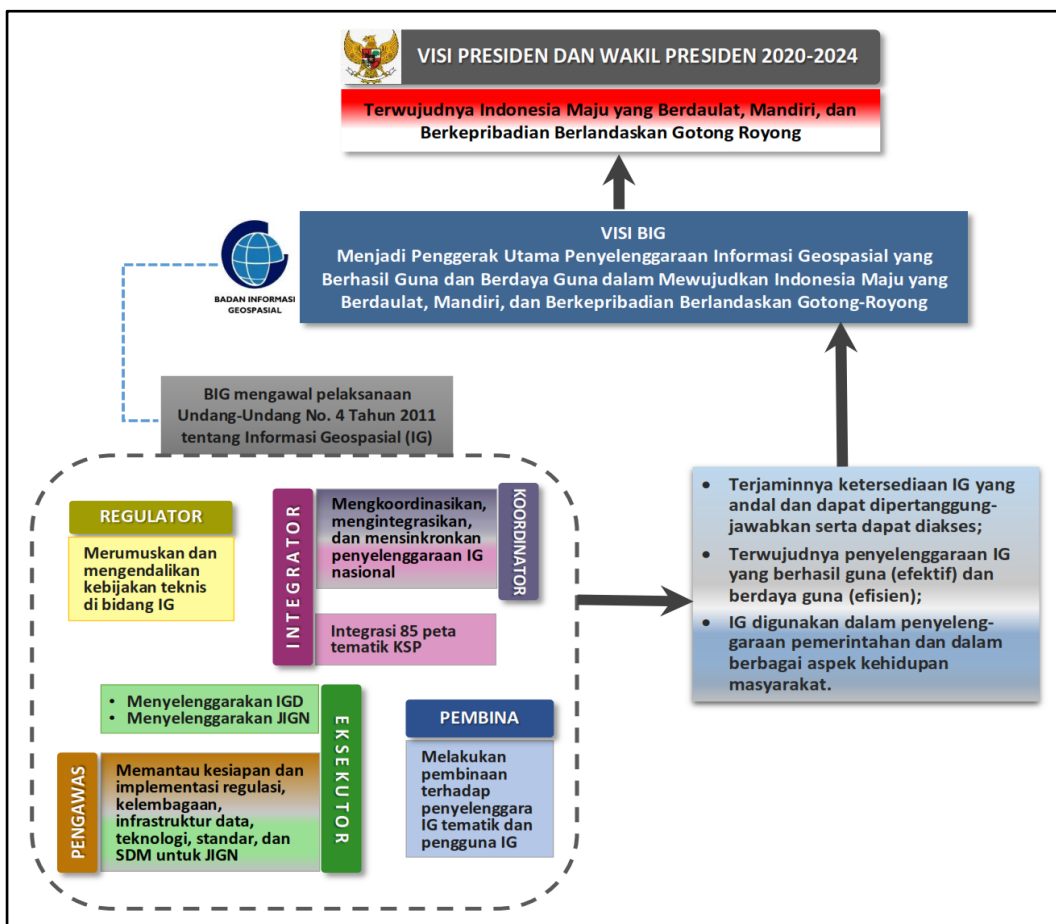
Rencana Strategis BIG merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) pada periode 2020-2024. Rencana Strategis BIG terdiri dari 2 (dua) bagian utama, yaitu penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional (Agenda Pembangunan) sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan dan strategi BIG yang merupakan perwujudan visi dan misi BIG yang akan dicapai pada tahun 2024. Selain kedua hal tersebut, Renstra BIG 2020- 2024 juga dilengkapi indikator-indikator keberhasilan yang dirinci per-tahun selama periode Renstra. Sehingga target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dapat terlihat progresnya dan tidak keluar dalam koridor dokumen perencanaan pada level nasional.

Upaya BIG untuk mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional, sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta penyesuaian dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maka visi BIG untuk tahun 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Berhasil Guna dan Berdaya Guna dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Rumusan Visi BIG tersebut sesuai dengan arahan penyesuaian terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 serta sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, khususnya Bab II Asas dan Tujuan pada Pasal 3. Secara garis besar, Visi BIG tersebut mengandung makna bahwa BIG adalah lembaga yang berada di depan dalam menyelenggarakan informasi geospasial nasional. Dengan kata lain BIG harus mampu menjadi motor (*prime mover*) dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang menjadi bagian penting dan strategis dari pembangunan Indonesia. Untuk mencapai visi pada tahun 2024 yang telah ditetapkan, BIG merumuskan misi untuk membangun kesamaan gerak dan komitmen seluruh entitas organisasi dan telah disesuaikan dengan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

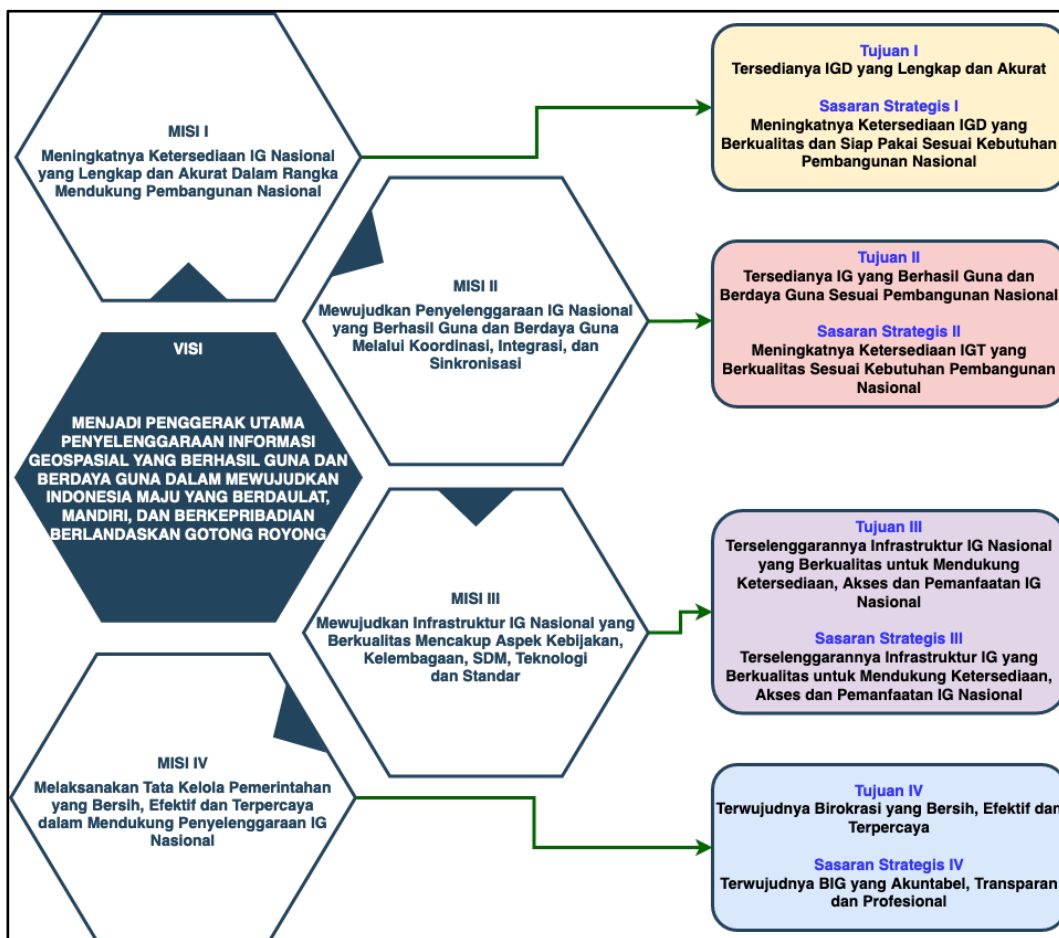
1. Meningkatkan ketersediaan informasi geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional;
2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
3. Mewujudkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar; dan
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.,



Gambar 2. 1 Keselarasan Visi dan Misi BIG dalam Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024

Untuk memperkuat dan mendorong tercapainya visi BIG serta dapat terlaksananya misi BIG tahun 2020-2024, maka diperlukan rumusan tujuan organisasi BIG yang fokus dan terarah. Selain itu, tujuan organisasi diperlukan untuk memperjelas visi dan misi yang telah ditetapkan, oleh karena itu dalam periode 2020-2024, BIG menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat;
2. Tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional;
3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional; dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.



Gambar 2. 2 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis BIG 2020-2024

## II.2 Penetapan Kinerja BIG Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Renstra BIG Tahun 2020-2024, maka disusun rumusan sasaran strategis yang terdiri dari indikator kinerja dan targetnya yang akan dicapai setiap tahun sesuai periode renstra. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2022 dibakukan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 5.2 Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024.

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen dari pimpinan organisasi yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Realisasi dari target perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun tersebut secara reguler dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Hal tersebut untuk mengetahui progres dalam mencapai target kinerja dan mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi. Sehingga dapat dilakukan antisipasi dan tindak lanjut agar target kinerja tetap tercapai pada akhir tahun. Pada pertengahan tahun 2022 tepatnya bulan Agustus, BIG melakukan perubahan Perjanjian Kinerja dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pada lingkup internal maupun lingkup nasional. Hal tersebut sedikit banyak memengaruhi perubahan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

Hasil capaian kinerja BIG pada tahun 2022 berdasarkan dokumen revisi perjanjian kinerja diukur melalui 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Perubahan IKU BIG pada tahun 2022 merupakan hasil arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dimana target kinerja harus merepresentasikan *outcome*. Oleh karena itu, BIG melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tabel Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 (Semula Menjadi Pasca Revisi)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PK Awal (Januari)	PK Revisi (Agustus)
<b>1. Tersedianya informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat</b>			
1.1. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	1.1.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional	23,53%	21,31%
	1.1.2. Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional	9,45%	9,075%
<b>2. Tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional</b>			

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PK Awal (Januari)	PK Revisi (Agustus)
2.1. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	2.1.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	73,79%	73,79%
	2.1.2. Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang	20,40%	21,31%
	2.1.3. Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	22,62%	63,10%
<b>3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional</b>			
3.1. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional	3.1.1. Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas	7,23 (Skala 1-10)	7,62 (Skala 1-10)
<b>4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional</b>			
4.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya	4.1.1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG	76 (Nilai RB)	76 (Nilai RB)

Berdasarkan table 2.1, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang masing-masing diturunkan menjadi IKU yang akan dilaksanakan pada 2 (dua) program utama BIG, yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen. Sasaran Strategis dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari target Renstra BIG Tahun 2020-2024 yang ditetapkan menjadi target tahunan.

- Sasaran Strategis 1.1: “Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional”. Sasaran tersebut memiliki pengertian bahwa BIG sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan IGD, masih belum dapat menyediakan secara penuh terkait data dan informasi geospasial dasar untuk mendukung pembangunan nasional. Sehingga setiap tahun perlu diukur peningkatan ketersediaan IGD yang berkualitas dan siap pakai, sehingga kegiatan/produk yang dihasilkan oleh BIG dapat terlihat pemanfaatannya untuk kebutuhan pembangunan nasional. Sasaran ini merupakan tanggung jawab dari Kedeputusan Bidang Informasi Geospasial Dasar dan seluruh UKE II di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahun;

- Sasaran Strategis 2.1: “Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional”. Pemenuhan data dan informasi geospasial tematik di Indonesia dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda dan masyarakat. Dalam hal tersebut, BIG memiliki tugas dalam hal pembinaan kepada K/L/P/M dalam proses penyusunan IGT dan dapat menyelenggarakan IGT yang belum dilakukan oleh pihak lain. Pada sasaran ini diperlukan indikator untuk melihat peningkatan ketersediaan IGT di Indonesia, baik yang telah dilakukan pembinaan (IGT Terbina) dan yang diselenggarakan oleh BIG (IGT Strategis). Unit kerja yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran dan indikator ini adalah Kedepuyan Bidang Informasi Geospasial Tematik dan seluruh UKE II di bawahnya;
- Sasaran Strategis 3.1: “Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional”. Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas diukur berdasarkan kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG dan kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG. Kedepuyan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dan seluruh UKE II di bawahnya memiliki tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan indikator ini; dan
- Sasaran Strategis 4.1: “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya”. Untuk mendukung tercapainya sasaran ini diperlukan suatu indikator yang sesuai dan merepresentasikan kegiatan yang dilakukan pada program dukungan manajemen, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BIG. Kegiatan dan aktivitas untuk mendukung reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab satu unit organisasi, namun pada teknis kegiatannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama sebagai penanggung jawab.

### **II.3 Alokasi Anggaran**

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, BIG mendapatkan alokasi awal APBN sebesar Rp. Rp495.119.418.000. Seiring dengan berjalannya kegiatan tahun 2022, terdapat beberapa kebijakan nasional yang mengakibatkan 2 (dua) kali perubahan anggaran,



yaitu pada bulan November 2021 dan Mei 2022. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik sehingga perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L.

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran BIG Tahun 2022 (*dalam ribuan rupiah*)

<b>Program</b>	<b>Pagu Awal</b>	<b><i>Automatic Adjustment I</i><sup>3</sup></b>	<b><i>Automatic Adjustment II</i><sup>4</sup></b>
<b>PIG<sup>1</sup></b>	314.513.289	12.331.038	27.686.771
<b>DM<sup>2</sup></b>	180.606.129	12.126.133	3.506.504
<b>Total</b>	<b>495.119.418</b>	<b>24.457.171</b>	<b>31.193.275</b>

Keterangan:

<sup>1</sup> Penyelenggaraan Informasi Geospasial

<sup>2</sup> Dukungan Manajemen

<sup>3</sup> Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021

<sup>4</sup> Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pagu akhir yang dialokasikan APBN untuk mendukung aktivitas BIG terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah sebesar Rp274.495.480.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp164.973.492.000. Selain itu pada bulan Agustus 2022, BIG mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp12.776.227.000 untuk Program Penyelenggaraan IG, sehingga pagu akhir BIG tahun 2022 adalah sebesar Rp452.245.199.000.

Pengurangan pagu anggaran sebesar 8,66% dari pagu awal yang ditetapkan membuat BIG melakukan *review* target kinerja tahun 2022, sehingga dilakukan revisi perjanjian kinerja pada Triwulan III untuk mencerminkan kinerja yang lebih realistis pada semua unit kerja.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

**3.2 Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran Strategis**

**3.3 Kinerja Anggaran**

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

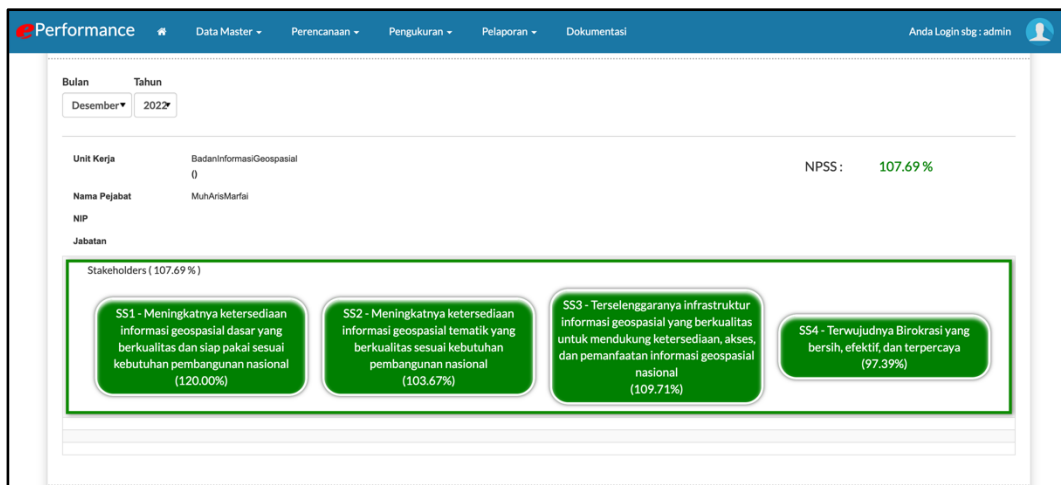
Kinerja BIG selama tahun 2022 dapat dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didapatkan dari perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada setiap sasaran. Tahun 2022 ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan kinerja berdasarkan Renstra BIG Tahun 2020-2024. Dinamika organisasi dan kebijakan pada tingkat nasional cukup memengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, sehingga perlu disesuaikan (revisi) untuk menjaga konsistensi capaian kinerja yang tetap merpresentasikan *outcome*.

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, BIG melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan kepada setiap Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II. Proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepegawaian kepada tim yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perencanaan serta evaluasi dan pelaporan pada masing-masing UKE I dan II di lingkungan BIG. Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja BIG setiap triwulan dilakukan oleh tim tersebut berdasarkan SK Sekretaris Utama No. 12.1 Tahun 2022 tentang Tim Perencana APBN BIG dan SK Sekretaris Utama No. 13 Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi dan Pelaporan di BIG. Selain itu terdapat juga tim yang bertugas untuk melakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 sebagai koordinator dalam perhitungan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis yang tertuang dalam SK Kepala BIG No. 53 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja BIG Tahun 2022.

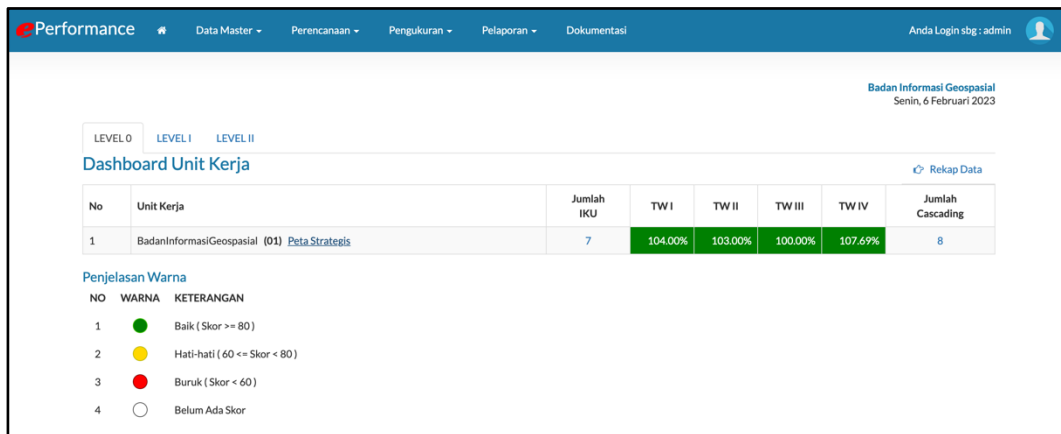
Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan BIG sudah menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses secara daring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui alamat <https://egov.big.go.id/eperformance>. Dalam pelaksanaannya, proses perhitungan kinerja menggunakan manual IKU yang disusun dan disepakati saat penetapan kinerja dan dibukukan menjadi Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

mulai dari Sasaran Kegiatan (SK), Sasaran Program (SP) hingga Sasaran Strategis (SS).

Pada setiap triwulan dilakukan pengukuran dan pemantauan terhadap IKU melalui aplikasi *e-performance* tersebut oleh para Tim Perencana dan Tim Evaluasi & Pelaporan. Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau skor kinerja BIG tahun 2022 mencapai 107,69% atau mengalami peningkatan sebesar 5,16% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 102,53%



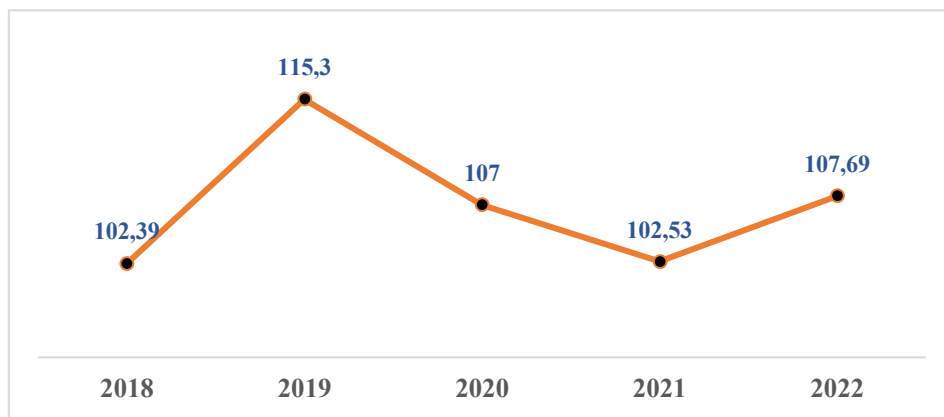
Gambar 3. 1 Tampilan Capaian IKU BIG Tahun 2022 pada Aplikasi *e-performance*



Gambar 3. 2 Tampilan Capaian IKU BIG Setiap Triwulan Tahun 2022 pada Aplikasi *e-performance*

### III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Nilai kinerja BIG tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,16% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai kinerja tersebut berasal dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan capaian di atas 100%, sementara hanya 1 (satu) sasaran strategis yang tidak tercapai pada tahun 2022, yaitu pada IKU Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, peningkatan nilai kinerja BIG tahun 2022 dikarenakan adanya IKU baru yang semakin merepresentasikan *outcome* terhadap kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh BIG.



Gambar 3. 3 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 3.2 bahwa capaian indikator kinerja BIG selama 5 (lima) tahun terakhir bergerak secara fluktuatif, tetapi masih berada di atas angka 100%. Peningkatan nilai kinerja pada tahun 2022, menunjukkan capaian kinerja BIG lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan IKU yang semuanya berorientasi *outcome* dan memiliki capaian di atas target yang telah ditetapkan

Dinamika dan permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yang dijanjikan merupakan bukti bahwa BIG senantiasa melakukan perbaikan dalam proses perumusan kinerja dari tahun ke tahun. Indikator kinerja secara perlahan diarahkan pada fokus pemanfaatan (*outcome*). Sehingga BIG sebagai entitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN tidak hanya melakukan aktivitas untuk menghasilkan suatu *output*, namun apa yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata dalam proses pembangunan nasional.

Tahun 2022, BIG memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dapat diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Proses perubahan atau revisi perjanjian kinerja dilakukan pada triwulan III tahun 2022 untuk mengakomodir penyesuaian target kinerja karena adanya kebijakan nasional terkait pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) dan perubahan perhitungan (formula) terhadap target indikator kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2022

Sasaran Strategis	IKU	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Nilai Kinerja
1. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	1.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional	23,53%	21,31%	28,44%	133,46%
	1.2. Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional	9,45%	9,08%	11,83%	130,36%
2. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	2.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	73,79%	73,79%	74,16	100,5%
	2.2. Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang	20,40%	21,31%	21,81%	102,35%
	2.3. Persentase (%) IGT strategis yang dimantaatkan oleh K/L/P	22,62%	63,10%	68,45%	108,48%

Sasaran Strategis	IKU	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Nilai Kinerja
3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional	3.1. Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas	7,23	7,62	8,36	109,71%
		Indeks (Skala Likert 1-10)	Indeks (Skala Likert 1-10)	Indeks (Skala Likert 1-10)	
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya	1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG	76 (Nilai RB)	76 (Nilai RB)	74,02 (Nilai RB)	97,39%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>107,69%</b>

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa perubahan target kinerja dilakukan pada IKU pertama, yang semula sebesar 23,53% menjadi 21,31% dan pada IKU kedua, yang semula sebesar 9,45% menjadi 9,08%. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi terhadap kebijakan nasional terkait pencadangan anggaran (*automatic adjustment*), sehingga terdapat kegiatan pada penyediaan peta dasar dan penyediaan SRGI (Sistem Referensi Geospasial Indonesia) yang mengalami penurunan target/volume kegiatan.

Selanjutnya, perubahan target kinerja dilakukan pada IKU keempat, yang semula sebesar 20,40% menjadi 21,31% dan pada IKU kelima, yang semula sebesar 22,62% menjadi 63,10%. Secara umum perubahan target pada kedua IKU tersebut untuk menyesuaikan terhadap perhitungan (formula) indikator kinerja yang mengalami perubahan pada tahun 2022. Khususnya pada kegiatan pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sejak tahun 2020 hingga 2022. Penyesuaian target kinerja yang terakhir terdapat pada IKU 3.1 Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas, yang semula sebesar 7,23 menjadi 7,62. Perubahan target kinerja menjadi meningkat pada IKU 3.1 dilakukan karena sejak TW II tahun 2022 sudah terlihat potensi capaian yang berlebih. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian sehingga meminimalkan anomali capaian kinerja pada akhir tahun.

## **III.2 Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran Strategis**

Capaian kinerja BIG setiap tahun dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja. Kinerja dapat dikatakan tercapai apabila realisasi kinerja sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja. Faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidaknya kinerja BIG tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada bagian ini, sehingga dapat disimpulkan suatu rekomendasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

### **III.2.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang Berkualitas dan Siap Pakai Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional**

Sasaran strategis yang pertama merupakan bagian dari tujuan organisasi sesuai dengan Renstra BIG 2020-2024, yaitu Tersedianya Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang lengkap dan akurat. Penyelenggaraan IGD yang lengkap dan akurat menjadi salah satu ujung tombak penyelenggaraan IG nasional yang andal. Setiap tahun tuntutan kebutuhan nasional atas IGD sangat tinggi, termasuk batas negara dan administrasi wilayah, namun hal tersebut belum sepenuhnya tersedia secara lengkap dan akurat. Selain itu, penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk kebutuhan perencanaan pembangunan membutuhkan IGD sebagai acuan dan basis datanya.

Terdapat 2 (dua) IKU yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis yang pertama, yaitu (i) persentase ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional; dan (ii) pertumbuhan penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Ketersediaan IGD yang dimaksud dalam IKU ini dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ketersediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) dan ketersediaan Peta Dasar. Sementara pertumbuhan penggunaan IGD yang dimaksud juga dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu pertumbuhan SRGI secara nasional dan pertumbuhan penggunaan peta dasar secara nasional.



**A. Indikator Kinerja Utama 1: Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional**

Sebagai instansi yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan IGD, BIG berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan lengkap secara nasional pada tahun 2024 sesuai amanah RPJMN 2020-2024.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja IKU 1 pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang Berkualitas dan Siap Pakai Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional</b>			
<b>IKU</b>	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional			
<b>Kinerja Pembentuk</b>	1. Ketersediaan SRGI 2. Ketersediaan Peta Dasar			
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>	<b>Capaian 2021</b>
Persentase	21,31%	28,44%	133,46%	108,16%

**1. Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)**

Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) adalah sistem referensi geospasial yang terdiri dari unsur SRGI Horizontal, SRGI Vertikal dan Datum Pasang Surut yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah NKRI serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Dikatakan berkualitas apabila SRGI telah memenuhi standar ditetapkan dengan mengacu pada SNI ISO 19157:2015, khususnya elemen kelengkapan (*completeness*), kualitas temporal (*temporal quality*), dan ketelitian posisi (*positional accuracy*). Setelah memenuhi standar yang ditetapkan, SRGI yang berkualitas tersebut disimpan/dikelola dalam suatu basis data geospasial terpadu dan siap diakses/digunakan oleh pengguna internal/eksternal BIG melalui mekanisme yang ditetapkan sehingga disebut SRGI yang siap pakai.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga membutuhkan stasiun/titik kontrol referensi yang memadai. Kondisi yang terjadi saat ini adalah persebaran SRGI masih dominan berada

di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Upaya yang dilakukan BIG adalah percepatan pembangunan *Continuously Operating Reference Station* (CORS) atau yang biasa disebut dengan Stasiun InaCORS dan merupakan bagian dari SRGI Horizontal. Jumlah Stasiun InaCORS pada tahun 2022 sebanyak 397 stasiun atau sebesar 89% dari target 447 stasiun yang akan dicapai BIG sesuai target RPJMN 2020-2024. Secara ideal, ketersediaan stasiun InaCORS untuk mendukung percepatan kegiatan pemetaan dasar skala besar minimal berjumlah 400 stasiun. Oleh karena itu, BIG fokus pada pemenuhan data dan informasi geospasial dasar selama periode 2020-2024.

Tabel 3. 3 Capaian Kegiatan SRGI Tahun 2022

SRGN	Output	Komponen	Target	Realisasi	% Target	% Realisasi
SRGI Horizontal	Stasiun INA CORS yang dibangun	Jumlah stasiun CORS yang dibangun	45 Stasiun	45 Stasiun	100%	100%
	Jaring Kontrol Geodinamika yang dikelola	Jumlah TPG yang dimutakhirkan	90 Titik	90 Titik	100%	100%
	Stasiun CORS yang dikelola	Jumlah Stasiun InaCORS yang dikelola	352 Stasiun	352 Stasiun	100%	100%
SRGI Vertikal	InaGeoid yang Dimutakhirkan	Luasan InaGeoid yang Dimutakhirkan	396.682 Km <sup>2</sup>	396.682 Km <sup>2</sup>	100%	100%
	Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang dikelola	Jumlah Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang dikelola	47 Unit	47 Unit	100%	100%
	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun	Jumlah Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun	40 Stasiun	40 Stasiun	100%	100%
	Stasiun Pasang Surut yang dikelola	Jumlah Stasiun Pasang Surut yang dikelola	90 Stasiun (on site)	90 Stasiun (on site)	100%	100%

Selanjutnya, BIG melakukan upaya pemutakhiran InaGeoid pada tahun 2022 seluas 535.104 Km<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SRGI Vertikal. Luas *coverage* Ina-Geoid secara nasional pada tahun 2022 adalah perbandingan antara realisasi luasan InaGeoid yang dimutakhirkan di tahun berjalan terhadap target luasan. Target luasannya adalah luas total daerah daratan Indonesia dengan total luasan adalah 1.899.692 km<sup>2</sup>. Berdasarkan Renstra BIG 2020-2024, target yang akan dicapai BIG untuk pemutakhiran InaGeoid ini adalah seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024.

Kegiatan penyediaan SRGI yang terakhir adalah melakukan pembangunan stasiun pasang surut dan mengelola stasiun yang telah terbangun. Stasiun pasang surut digunakan untuk mendukung kegiatan pemetaan skala besar serta mendukung program mitigasi bencana (*Indonesia Tsunami Early Warning System/InaTEWS*). Berdasarkan amanat RPJMN 2020-2024, BIG harus membangun 150 stasiun pasang surut permanen untuk penguatan InaTEWS. Sehingga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana dan dapat mengurangi kerusakan dan/atau kerugian akibat bencana.

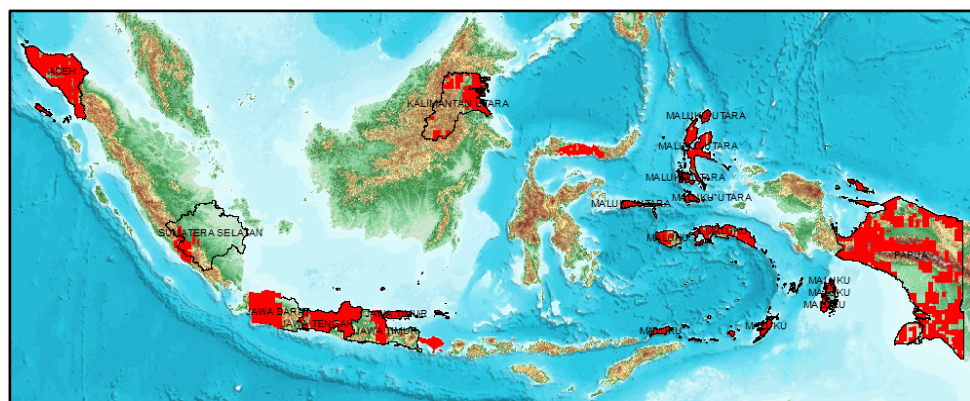
## 2. Peta Dasar

Peta dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang memberikan informasi geospasial di wilayah darat, pantai dan laut. Untuk menghitung ketersediaan peta dasar dengan mempertimbangkan 5 komponen, yaitu (i) Data Geospasial Dasar wilayah darat; (ii) Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah darat; (iii) Informasi Geospasial unsur peta dasar batas wilayah; (iv) Data Geospasial Dasar wilayah laut dan pantai; dan (v) Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah laut dan pantai. Peta dasar yang berkualitas adalah peta dasar yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dengan mengacu pada SNI ISO 19157:2015, khususnya elemen kelengkapan (*completeness*), ketelitian tematik (*thematic accuracy*), konsistensi logis (*logical consistency*), kualitas temporal (*temporal quality*), dan ketelitian posisi (*positional accuracy*).

Badan Informasi Geospasial sebagai instansi yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) berupaya meningkatkan kapasitas produksi peta dasar skala besar (1:5.000). Sejak tahun 2013, total *coverage* peta dasar skala besar hanya sekitar 562,39 Km<sup>2</sup> dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 12.231,97 Km<sup>2</sup> pada tahun 2019 dan 13.118,87 Km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Jumlah tersebut sekitar 2,57% dari total luas wilayah darat NKRI yaitu seluas 1.891.304 Km<sup>2</sup>. Upaya yang dilakukan BIG untuk meningkatkan ketersediaan peta dasar adalah dengan

mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Proses perencanaan dan persiapan melalui mekanisme tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021, sementara proses pelelangan paket pekerjaan dilakukan pada tahun 2022. Sehingga tahap implementasi kegiatan percepatan penyediaan peta dasar skala besar menggunakan skema KPBUMN akan dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan percepatan penyediaan peta dasar skala besar diproyeksikan akan selesai seluruh wilayah Indonesia (wilayah *urban* dan *rural*) pada tahun 2024. Sehingga BIG dapat memenuhi kebutuhan terkait peta dasar skala besar untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

Pada tahun 2022, BIG melakukan kegiatan orthorektifikasi atau pengolahan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) yang merupakan proses memosisikan kembali posisi citra satelit ke posisi sebenarnya dikarenakan pada saat pengambilan citra terjadi pergeseran (*displacement*) yang diakibatkan posisi miring pada satelit dan variasi topografi. Untuk menghilangkan distorsi pada citra tersebut dibutuhkan data *Digital Elevation Model* (DEM) dan *Ground Control Point* (GCP). Area yang ditegakkan merupakan area yang ada hasil pengukuran GCP tahun 2015-2022 dan beberapa area berdasarkan hasil kebutuhan pengguna. Lokasi kegiatan untuk Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Lokasi Kegiatan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (Orthorektifikasi)

Salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan BIG pada tahun 2022 adalah Penelahaan Nama Rupabumi. Produk yang dihasilkan adalah Gazeter Republik Indonesia (GRI), merupakan daftar yang berisi nama rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi dan nama ibu kota NKRI. Gazeter yang disusun oleh BIG akan menambah, mengukuhkan, memperkuat dan membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai proses pembangunan.



Gambar 3. 5 Dokumen Gazeter Republik Indonesia (GRI) Tahun 2022

## **B. Indikator Kinerja Utama 2: Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memberikan arahan bahwa dalam merumuskan indikator kinerja perlu mempertimbangkan nilai kemanfaatan (*outcome*) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh K/L. Oleh karena itu, pada tahun 2022 BIG merumuskan indikator kinerja baru yang diharapkan dapat merepresentasikan capaian *outcome* pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai instansi pemerintah yang diberikan kewenangan tunggal dalam penyelenggaraan IGD perlu melakukan identifikasi terkait produk dan/atau jasa yang telah dimanfaatkan oleh

*stakeholders*. Sehingga dengan adanya indikator kinerja yang berorientasi *outcome* dapat terlihat eksistensi BIG melalui produk dan/atau jasa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan.

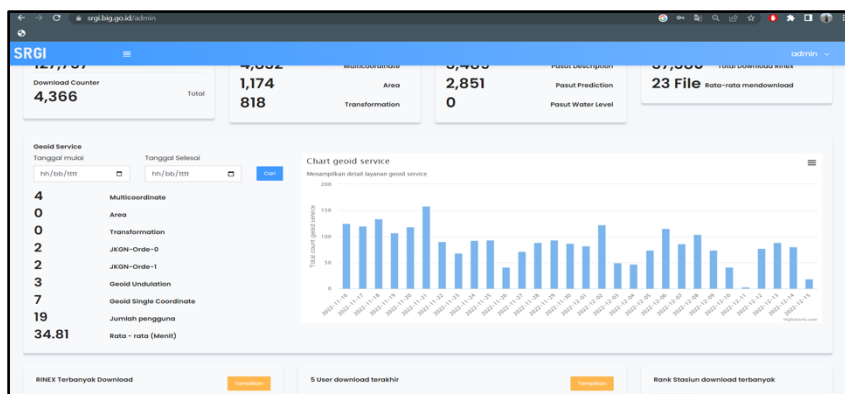
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja IKU 2 pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang Berkualitas dan Siap Pakai Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional</b>		
<b>IKU</b>	Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional		
<b>Kinerja Pembentuk</b>	1. Pertumbuhan Penggunaan SRGI Secara Nasional 2. Pertumbuhan Penggunaan Peta Dasar Secara Nasional		
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Persentase	9,08%	11,83%	<b>130,29%</b>

### 1. Pertumbuhan Penggunaan SRGI

Pertumbuhan penggunaan SRGI diukur dengan cara membandingkan jumlah penggunaan layanan SRGI selama tahun 2022 dengan jumlah penggunaan layanan yang sama selama tahun 2021. Layanan SRGI yang dapat dihitung penggunaannya adalah layanan SRGI Horizontal dan layanan SRGI Vertikal.

Layanan SRGI Horizontal terdiri dari berbagai macam penyediaan layanan yang diberikan, yaitu *download* data RINEX untuk keperluan *postprocessing* pada website SRGI, layanan *online postprocessing*, layanan koreksi RTK, *download* data koordinat pada *website* SRGI, kontribusi data Ina-CORS ke institusi internasional dan permintaan data Ina-CORS melalui surat. Untuk layanan SRGI Vertikal terdiri dari layanan *streaming/realtime* data pasang surut untuk Ina-TEWS, *download* datum pasang surut dan deskripsi koordinat pada *website* SRGI, permintaan data pasang surut melalui surat, kontribusi data pasang surut ke institusi internasional, *download* data geoid pada *website* SRGI dan permintaan data gayaberat/geoid melalui surat.



Gambar 3. 6 Tampilan Laman Situs Layanan SRGI (srgi.big.go.id)

Tabel 3. 5 Penghitungan Penggunaan Layanan SRGI Horizontal dan Vertikal Tahun 2022

LAYANAN SRGI HORIZONTAL									
No	Layanan SRGI Horizontal	Satuan	Bobot	Konstanta Pengali bobot	Kondisi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi Pertumbuhan 2022	Realisasi Pertumbuhan 2022 x bobot
1	Download RINEX data untuk keperluan <i>postprocessing</i> pada <i>website</i> SRGI	Download	30%	35%	5000	5500	5934	18,68%	1,96%
2	<i>Online postprocessing</i>	Permintaan	25%	35%	18000	18900	20349	13,05%	1,14%
3	Layanan koreksi RTK	Pengukuran	25%	35%	1000000	1100000	1052074	5,21%	0,46%
4	Download Data koordinat pada <i>website</i> SRGI	Download	5%	35%	500	525	0	-100,00%	-1,75%
5	Kontribusi data Ina-CORS ke Institusi Internasional	Stasiun	10%	35%	8	8	8	0,00%	0,00%
6	Permintaan data Ina-CORS via surat	Permintaan	5%	35%	24	25	41	70,83%	1,24%
<b>JUMLAH</b>									<b>3,05%</b>
LAYANAN SRGI VERTIKAL									
No	Layanan SRGI Vertikal	Satuan	Bobot	Konstanta Pengali bobot	Kondisi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi Pertumbuhan 2022	Realisasi Pertumbuhan 2022 x bobot
1	Layanan <i>Streaming/Realtime</i> data Pasut untuk Ina-TEWS	Stasiun	65%	35%	166	206	206	24,10%	5,48%
2	Permintaan data Pasut via surat	Permintaan	25%	35%	74	80	89	20,27%	1,77%
3	Kontribusi data pasut ke Institusi Internasional	Stasiun	10%	35%	9	9	9	0,00%	0,00%
4	Download data geoid dari <i>website</i> SRGI	Download	70%	30%	3204	3525	3603	12,45%	2,62%
5	Permintaan data gayaberat/geoid via surat	Permintaan	30%	30%	19	21	16	-15,79%	-1,42%
<b>JUMLAH</b>									<b>8,45%</b>

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa total persentase realisasi pertumbuhan penggunaan SRGI adalah jumlah dari realisasi pertumbuhan penggunaan layanan SRGI Horizontal dan pertumbuhan penggunaan layanan SRGI Vertikal yaitu sebesar 11,50%.

## **2. Pertumbuhan Penggunaan Peta Dasar**

Pertumbuhan penggunaan peta dasar diukur dengan cara membandingkan jumlah unduhan data garis pantai, batimetri, hidrografi, batimetri nasional, hipsografi, geologi, transportasi, lingkungan terbangun, vegetasi, toponimi, tanah, utilitas, DEMNAS, dan batas wilayah selama tahun 2022 dengan jumlah unduhan data yang sama selama tahun 2021.

Penghitungan penggunaan peta dasar tahun 2022 diambil dari beberapa target indikator kinerja program pada tingkat Eselon I, yaitu (i) persentase pertumbuhan penggunaan unsur peta dasar wilayah darat secara Nasional oleh K/L/P/*stakeholder* sebesar 4% dari target 4%; (ii) persentase pertumbuhan penggunaan unsur peta dasar batas wilayah desa/kelurahan secara nasional sebesar 30,43% dari target 11%; (iii) persentase pertumbuhan penggunaan unsur peta dasar batas wilayah secara nasional sebesar 4,57% dari target 5%; dan (iv) persentase pertumbuhan penggunaan data dan informasi geospasial wilayah laut dan pantai secara nasional sebesar 9,64% dari target 7%. Sehingga total pertumbuhan penggunaan peta dasar pada tahun 2022 adalah sebesar 12,16% dari target 6,75%.



### **III.2.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional**

Sasaran strategis yang kedua merupakan bagian tujuan yang akan dicapai BIG tahun 2024, yaitu tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional. Ketersediaan informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna akan memberikan manfaat yang sangat besar dan akseleratif bagi pembangunan nasional. Penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif dan efisien, serta tepat guna dan tepat sasaran akan mempermudah proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga akan memberikan hasil yang lebih berkualitas dengan nilai tambah yang berpihak pada karakteristik lokal wilayah.

Terdapat 3 (tiga) IKU yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis yang kedua, yaitu (i) persentase ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional; (ii) persentase jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang; dan (iii) persentase IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P.

#### **A. Indikator Kinerja Utama 1: Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional**

Ketersediaan IGT yang dimaksud dalam IKU ini dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ketersediaan tema IGT yang dibina dan ketersediaan cakupan wilayah IGT strategis. Penyediaan IGT sesuai kebutuhan (prioritas) pembangunan nasional dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan pembinaan, yang secara khusus mencakup kegiatan bantuan teknis, asistensi, dan supervisi serta penerbitan rekomendasi untuk IGT yang telah terbina dan sesuai dengan standar. Upaya pembinaan yang dilakukan BIG tidak hanya kepada K/L/P, namun juga terhadap para pemangku kepentingan lainnya dan kalangan pengguna

untuk turut mewujudkan ketersediaan IGT yang sesuai standar secara lebih luas.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja IKU 1 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

<b>SS 2 Meningkatkan Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional</b>				
<b>IKU</b>	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional			
<b>Kinerja Pembentuk</b>	1. Ketersediaan Tema IGT yang dibina 2. Ketersediaan Cakupan Wilayah IGT Strategis			
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>	<b>Capaian 2021</b>
Persentase	73,79%	73,79%	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 1. Pembinaan IGT

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan peran sebagai Pembina IG dengan melakukan pembinaan kepada K/L/P dan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) hal yang dilakukan BIG dalam kapasitasnya melakukan pembinaan kepada K/L/P dan pemangku kepentingan, yaitu IGT terstandar, IGT terbina dan rekomendasi peta RTR. Rekomendasi tema IGT terstandar adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah sesuai dengan standar yang ada. Sementara rekomendasi IGT terbina adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah siap berbagipakai. Selanjutnya Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang adalah rekomendasi peta dasar untuk penyusunan RTR yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, BIG melakukan 4 (empat) kegiatan penyelenggaraan IGT terstandar, yaitu (i) Penyelenggaraan IGT Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik Negara (BMN); (ii) penyelenggaraan IG Daerah Tangkapan Air Danau; (iii) Penyelenggaraan IG Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan; dan (iv) Penyelenggaraan IGT Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

Selanjutnya terkait kegiatan penyelenggaraan IGT terbina, pada tahun 2022 BIG melakukan 5 (lima) kegiatan, yaitu (i) Penyelenggaraan IGT Tutupan

Kelapa Sawit; (ii) Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya; (iii) Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Baku Sawah



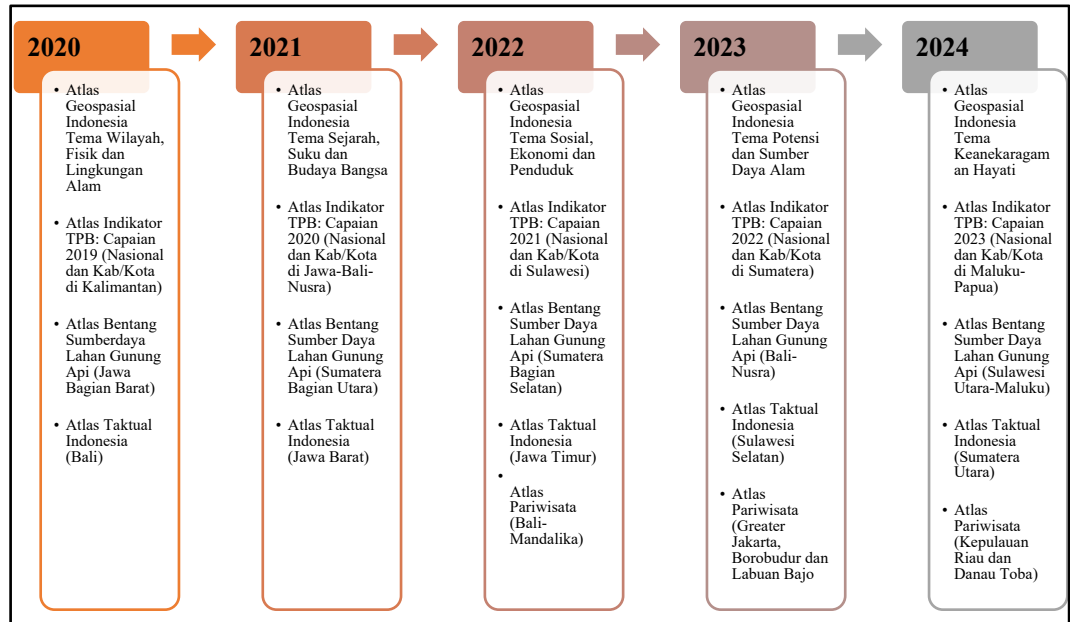
Nasional; (iv) Penyelenggaraan IGT Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi; dan (v) Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Rawan Bencana Tsunami Terbina

Gambar 3. 7 Kegiatan Uji Implementasi Lapangan Standar Proses penyelenggaraan IG DTA Danau

Pemberian rekomendasi peta dasar untuk penyusunan peta rencana tata ruang yang akan digunakan oleh pemerintah daerah adalah termasuk kegiatan pembinaan IGT yang dilakukan oleh BIG. Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja terkait rekomendasi peta dasar untuk RTR adalah dengan menjumlahkan 1.138 rekomendasi yang merupakan *baseline* tahun 2020 ditambah dengan 20 rekomendasi yang diselesaikan pada tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 terdapat 1.158 rekomendasi peta dasar untuk penyusunan RTR yang menjadi target nasional.

## 2. Penyelenggaraan IGT Strategis

Kegiatan penyelenggaraan IGT Strategis yang dilaksanakan oleh BIG adalah dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah dan permintaan dari K/L terkait. Penyelenggaraan IGT Strategis ditetapkan dalam Renstra BIG 2020-2024 dan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu (i) IGT Strategis PPIT yang terdiri dari 7 (tujuh) tema; (ii) IGT Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan yang terdiri dari 4 (empat); dan (iii) IGT Strategis Atlas yang terdiri dari 9 (sembilan) tema.



Gambar 3. 8 Road Map Penyelenggaraan Atlas oleh BIG Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari kinerja pembentuk dalam IKU, pembobotan kegiatan ini terdiri dari 80% penyelenggaraan IGT Strategis dan 20% pembuatan Atlas. Detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan BIG pada tahun 2022 untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Kegiatan Penyelenggaraan IGT Strategis Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Sumatera Bagian Selatan	24.883 Km <sup>2</sup>	100%
2.	Atlas Geospasial Indonesia Tema Sosial, Ekonomi dan Penduduk	1.899.695 Km <sup>2</sup>	100%
3.	Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pulau Sulawesi	187.106 Km <sup>2</sup>	100%
4.	Atlas Taktual Indonesia Wilayah Jawa Timur	48.237 Km <sup>2</sup>	100%
5.	Atlas Pariwisata Wilayah Bali	5.617 Km <sup>2</sup>	100%
6.	Atlas Pariwisata Wilayah Mandalika	1.174 Km <sup>2</sup>	100%
7.	IGT Integrasi Spasial-Statistik Wilayah Sumatera	477.928 Km <sup>2</sup>	100%
8.	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	1.899.695 Km <sup>2</sup>	100%
9.	IGT Peringatan Dini Banjir (Jawa Tengah)	4.591 Km <sup>2</sup>	100%
10.	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000 (Maluku, Papua)	492.831 Km <sup>2</sup>	100%
11.	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	40 Km <sup>2</sup>	100%
12.	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Maluku	25 Km <sup>2</sup>	100%
13.	IGT Pemodelan Dinamika Spasial untuk Rencana Tata Ruang	1.559 Km <sup>2</sup>	100%
14.	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Papua	5.146 Km <sup>2</sup>	100%

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa BIG telah berhasil melaksanakan seluruh target kegiatan penyelenggaraan IGT Strategis pada tahun 2022. Selain itu, BIG juga memiliki peran dalam mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan melakukan kegiatan IGT Integrasi Spasial-Statistik dan pembuatan Atlas TPB yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Penyelenggaraan IGT Strategis terkait dukungan terhadap implementasi SDI yang dilaksanakan BIG memiliki nilai manfaat yang tinggi, mengingat SDI hadir untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan data dengan integritas tinggi baik untuk data statistik, spasial, maupun administratif. Data dengan integritas tinggi memungkinkan pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan lainnya di berbagai sektor untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat.

#### **B. Indikator Kinerja Utama 2: Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang**

Rencana tata ruang memiliki peran yang penting dalam mengawal pengembangan dan pembangunan wilayah. Dokumen rencana tata ruang terdiri dari tujuan pembangunan wilayah, aturan mengenai pemanfaatan ruang hingga program pembangunan yang terintegrasi. Keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan mutlak diperlukan agar tercipta pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

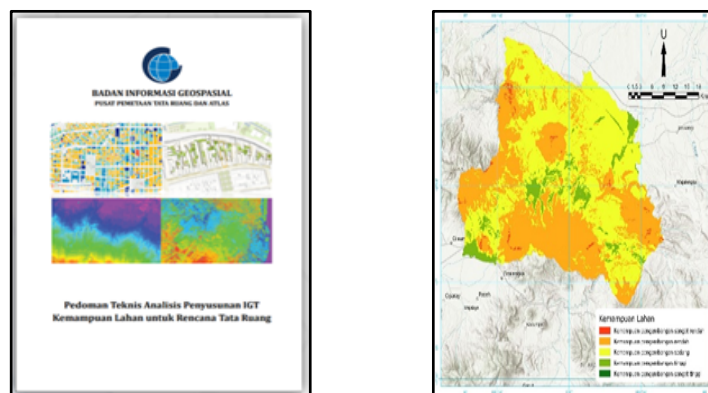
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja IKU 2 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional</b>		
<b>IKU</b>	Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang		
<b>Kinerja Pembentuk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan IGT Kemampuan Lahan</li> <li>2. Pembinaan Pemanfaatan IGD</li> <li>3. Penyelenggaraan IGT RTR</li> </ol>		
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Persentase	21,31%	21,81%	<b>102,35%</b>

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam IKU ini adalah pemerintah daerah yang menjadi target pembinaan oleh BIG, yaitu (i) Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam penyusunan IGT Kemampuan Lahan; (ii) Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan IGD; dan (iii) Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan IGT Rencana Tata Ruang (RTR).

### 1. Penyusunan IGT Kemampuan Lahan

Pada tahun 2022 Badan Informasi Geospasial melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan IGT Kemampuan Lahan. Tahapan yang dilakukan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pemutakhiran panduan pedoman teknik analisis penyusunan Peta Kemampuan Lahan dan pelaksanaan bimbingan teknis fasilitasi dan pembinaan IGT Kemampuan Lahan. Bimbingan teknis telah dilaksanakan untuk 70 Kabupaten/Kota di 6 provinsi yang dibagi menjadi 4 lokasi pelaksanaan. Capaian indikator kinerja ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 70 Pemerintah Daerah.

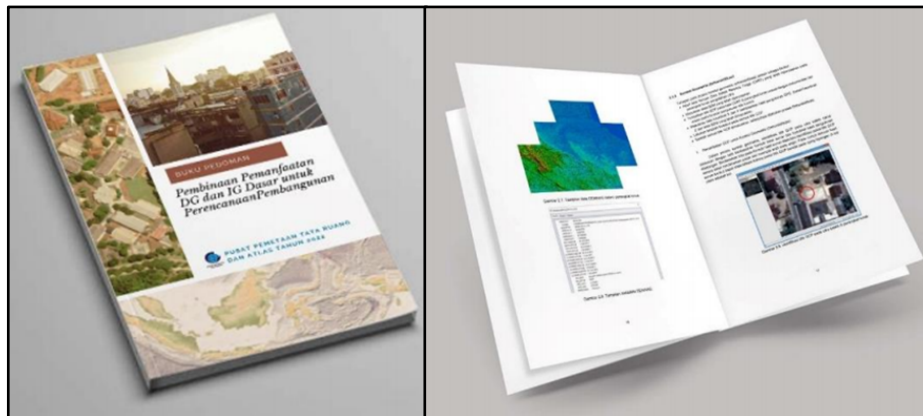


Gambar 3. 9 (kiri) Buku Pedoman Penyusunan Kemampuan Lahan, (kanan) Contoh Peta Kemampuan Lahan

## 2. Pembinaan Pemanfaatan IGD

Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan DG dan IG Dasar bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan. Informasi geospasial merupakan salah satu alat strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pada proses perencanaan wilayah, pemanfaatan informasi geospasial sangat penting untuk analisis dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pemanfaatan informasi geospasial berpotensi menjadi pengungkit sektor-sektor ekonomi modern.

Pada tahun 2022, kegiatan ini memiliki target 48 Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sebagai tujuan pembinaan pemanfaatan IGD. Sementara capaian yang dihasilkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 50 Kabupaten/Kota. Sehingga nilai kinerja yang dicapai adalah sebesar 104,17%.



Gambar 3. 10 Dokumen Pedoman Pembinaan Pemanfaatan DG dan IG untuk Perencanaan Pembangunan

## 3. Penyelenggaraan IGT Rencana Tata Ruang

Pemutakhiran peta dasar dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota masih terkendala ketersediaan SDM spasial yang kurang memadai serta keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan. Hal ini memerlukan adanya pembinaan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sekaligus pengguna informasi geospasial.

Jumlah pemerintah daerah yang menjadi target dalam kegiatan ini berjumlah 32 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Tapanuli Tengah, Simalungun, Lingga, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Lebong, Bangka, Belitung, Tanah Laut, Pulang Pisau, Kapuas, Paser, Ketapang, Kubu Raya, Lombok Timur, Ende, Manggarai, Alor, Nagekeo, Ngada, Mamasa, Maros, Barru, Bolaang Mongondow Timur, Pulau Morotai, Kepulauan Aru, Nabire, Kota Tual, Kota Sabang, dan Kota Balikpapan.

Hasil dari kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan IGT RTR adalah peta dasar yang termutakhir dan telah disetujui penggunaannya oleh BIG untuk penyelenggaraan IGT RTRW di 32 kabupaten/kota tersebut. Sehingga target dari kinerja ini dapat dikatakan tercapai dengan nilai 100%.



Gambar 3. 11 Dokumentasi Kegiatan Klinik Pembinaan Penyusunan Peta Dasar untuk RTRW

### **C. Indikator Kinerja Utama 3: Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P**

Pemanfaatan IGT Strategis adalah IGT yang diselenggarakan oleh BIG dan tercantum dalam Rencana Strategis BIG 2020 – 2024 yang dihitung dari akumulasi produksi akumulasi produksi tahun 2020 dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah dan/atau pimpinan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional serta dimanfaatkan oleh K/L/P. Untuk mendapatkan nilai capaian pada IKU ini diambil dari UKE II yang memiliki tugas dan fungsi



menyelenggarakan kegiatan IGT Strategis, yaitu Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) dan Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA).

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IKU 3 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

<b>SS 2</b>		<b>Meningkatnya Ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional</b>		
<b>IKU</b>	Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P			
<b>Kinerja Pembentuk</b>	1. Pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh PPIT 2. Pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh PPTRA			
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	
Persentase	63,10%	68,45%	<b>108,48%</b>	

### 1. IGT Strategis yang Diselenggarakan oleh PPIT

Persentase pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh PPIT adalah perbandingan jumlah IGT Strategis yang dimanfaatkan dengan akumulasi produksi IGT Strategis tahun sebelumnya. Terdapat 7 (tujuh) IGT strategis yang menjadi dasar penghitungan kinerja ini, yaitu (i) IGT Rawan Banjir; (ii) IGT Peringatan Dini Banjir; (iii) IGT Potensi Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil; (iv) IGT Deformasi Terintegrasi; (v) IGT Multirawan Bencana Terintegrasi; (vi) Peta Sistem Lahan Skala 1: 50.000; dan (vii) Peta Reaksi Cepat Kebencanaan.

Tabel 3. 10 Penghitungan Capaian Pemanfaatan IGT Strategis yang Diselenggarakan PPIT

No	IGT	Skala	Baseline (2020-2021)	Pemanfaatan			Total Pemanfaatan 2020-2021	% Capaian
				2020	2021	2022 (s.d. TW IV)		
1	Sistem Lahan	1:50.000	4	-	-	4	4	100
2	Potensi Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil	1:25.000	4	-	-	4	4	100
3	Rawan Banjir	1:50.000	40	-	-	40	40	100
4	Multirawan Bencana Terintegrasi	1:50.000	3	-	0	1	1	33,33
5	Deformasi Terintegrasi	1:250.000	5	-	0	0	0	0
6	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	-	11	5	6	0	11	100
7	Peringatan Dini Banjir	-	3	-	0	0	0	0
<b>% Capaian IGT Strategis yang dimanfaatkan</b>								<b>61,9</b>

## **2. IGT Strategis yang Diselenggarakan oleh PPTRA**

Persentase pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh PPTRA dihitung sejak produk tersebut selesai di produksi, berdasarkan Laporan Pemanfaatan Data, Surat Permintaan Data, Akses data melalui *web service* dan berita acara serah terima data oleh K/L/P atau publik. Dari 16 produk IGT Strategis dan Atlas yang dihasilkan Pusat PTR A dalam kurun waktu 2020-2021, sebanyak 12 produk yang telah dimanfaatkan. Sehingga target kinerja yang ditetapkan sebesar 75% untuk indikator kinerja ini dapat tercapai.

### **III.2.3 Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Infrastruktur Informasi Geospasial yang Berkualitas untuk Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional**

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan BIG, yaitu terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional. Dalam optimalisasi infrastruktur informasi geospasial, BIG melakukan pengembangan dan penguatan kerangka regulasi penyelenggaraan informasi geospasial melalui penyusunan rancangan standar nasional penyelenggaraan informasi geospasial, perumusan NSPK pengembangan keprofesian SDM bidang informasi geospasial (untuk industri dan survei pemetaan), dan skema penerapan standar bidang informasi geospasial.

Untuk melihat ketercapaian sasaran strategis ini digunakan Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas sebagai IKU dengan nilai 7,62 dari skala 1-10. Pengukuran Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu indeks dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG serta indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG. Kedua indikator pembentuk IKU tersebut memiliki

bobot masing-masing 50% yang akan menjadi satu kesatuan nilai untuk melihat ketercapaian sasaran strategis ini.

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

<b>Terselenggaranya Infrastruktur Informasi Geospasial yang Berkualitas untuk Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional</b>				
<b>SS 3</b>				
<b>IKU</b>	Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas			
<b>Kinerja Pembentuk</b>	1. Indeks Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar dan SDM IG 2. Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG			
<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>	<b>Capaian 2021</b>
Indeks (Skala Likert 1-10)	7,62	8,36	109,71%	105,68

### 1. Indeks Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar dan SDM IG

Indeks yang mengukur kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG diukur berdasarkan ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, regulasi SDM dan Industri IG yang berkompeten, kelembagaan simpul jaringan yang optimal, serta Efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional. Pengukuran indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG meliputi 4 (empat) indikator yang terbagi menjadi sub-sub indikator yang penilaiannya merupakan akumulasi capaian sampai dengan tahun 2022, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional dengan bobot 30%, meliputi kriteria ketersediaan dan pemanfaatan standar;
- b. Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten, dengan bobot 30%, meliputi kriteria ketersediaan kebijakan teknis, pembinaan SDM dan Industri Bidang IG;
- c. Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal dengan bobot 30%, mengenai penilaian terhadap kapasitas dan kinerja simpul jaringan; dan
- d. Indeks efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional dengan bobot 10%, meliputi ketersediaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pembagian persentase bobot mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan tugas yang sama antara standar, SDM dan industri, dan Simpul Jaringan. Untuk bobot 10% berfokus pada kajian efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG.

Tabel 3. 12 Capaian Indeks Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar dan SDM IG

No.	Indikator Pembentuk	Target	Realisasi
1.	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	7 Indeks (Skala 1-10)	7,7 Indeks (Skala 1-10)
2.	Indeks SDM dan Industri IG yang Kompeten	7 Indeks (Skala 1-10)	7,7 Indeks (Skala 1-10)
3.	Indeks Kelembagaan simpul jaringan yang optimal	7,1 Indeks (Skala 1-10)	7,12 Indeks (Skala 1-10)
4.	Indeks efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional	9 Indeks (Skala 1-10)	9,04 Indeks (Skala 1-10)
<b>Indeks Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar dan SDM IG</b>		$(7,7*30\%)+(7,7*30\%)+(7,12*30\%)+(9,04*10\%)=$ <b>7,66 Indeks</b>	

Pada poin pertama, Indeks Ketersediaan Standar Penyelenggaraan IG adalah ukuran yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kebermanfaatan standar informasi geospasial yang disusun berdasarkan indikator-indikator tertentu. Pengukuran indeks ketersediaan standar penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional merupakan akumulasi capaian sampai dengan tahun penilaian, yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator, yaitu (i) Indikator Ketersediaan Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG; (ii) Indikator Ketersediaan Standar Penyelenggaraan IG; dan (iii) Indikator Pemanfaatan Standar Penyelenggaraan IG.



Gambar 3. 12 Kegiatan Uji Implementasi Standar Penyelenggaraan IG Tahun 2022

Selanjutnya yang dimaksud SDM IG yang berkompeten adalah SDM ASN Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan merujuk pada Permen PANRB 27 tahun 2020 tentang jabatan fungsional surveyor pemetaan, dan SDM Professional (swasta) yang memiliki kompetensi bidang informasi geospasial, merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja 172 tahun 2020 tentang SKKNI bidang IG atau aturan yang berlaku. Sementara yang dimaksud Industri IG yang berkompeten adalah penyedia jasa bidang IG yang memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG.



Gambar 3. 13 Kegiatan Pembinaan JF Surveyor Pemetaan Tahun 2022

Pada poin ketiga, yang dimaksud simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. Simpul jaringan dinyatakan optimal jika sudah memiliki geoportal yang aktif dengan data yang terstandar, memiliki regulasi terkait penyelenggaraan IG serta menunjuk unit khusus penyelenggara IG. Berdasarkan kegiatan Simpul Jaringan IG Nasional yang optimal, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terbentuknya simpul jaringan yang optimal. Dengan terbentuknya simpul jaringan yang optimal proses perencanaan akan lebih mudah dilaksanakan.

Sementara itu simpul jaringan daerah terdiri dari seluruh Pemerintahan daerah mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Peran aktif dari simpul jaringan di tingkat daerah menentukan efektif atau tidaknya penyelenggaraan Informasi Geospasial ditingkat Nasional.



Gambar 3. 14 Penganugerahan Bhumandala Award - Inovasi Pemanfaatan IG Tahun 2022

Poin terakhir yaitu efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional, merupakan elemen yang penting untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan IG sudah sesuai dalam kaidah peraturan yang berlaku. Ketersediaan kebijakan mulai dari UU, PP, Perpres maupun peraturan turunan lainnya perlu dilihat dan dikaji bahwa kebijakan tersebut sudah efektif dan mendukung penyelenggaraan IG secara nasional. Adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan kebijakan nasional menjadi indikator pemenuhan kebijakan yang harus disediakan.

Dalam perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional menggunakan kriteria efektivitas kebijakan dimana sebuah evaluasi kebijakan harus memiliki kriteria kecukupan, responsivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan. Dari masing-masing kriteria tersebut kemudian disusun kajian untuk melihat apakah Kebijakan penyelenggaraan IG sudah efektif.



Gambar 3. 15 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Kajian Rekomendasi Efektivitas Kebijakan Satu Peta Dalam Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan

## **2. Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG**

Layanan yang berkualitas dapat diartikan sebagai layanan yang memenuhi standar-standar tertentu. Pengawasan kualitas layanan teknologi ini dilakukan dengan menerapkan standar (ISO27001, ISO2000) ataupun dasar hukum seperti Peraturan Kepala BIG. Penerapan standar dilakukan terhadap penyampaian layanan, spesifikasi teknis *data center*, keamanan (*data center*, aplikasi), dan pengelolaan data. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) dari layanan TI (aplikasi, data, infrastruktur TI) selalu ada untuk BIG dan pengguna eksternal dalam rangka mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG.

Pengukuran indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG terdiri dari 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu:

- a. Kualitas *data center*, digunakan untuk memotret capaian / realisasi dari parameter spesifikasi teknis data center, layanan data center dan keamanan informasi *data center*;
- b. Kualitas layanan pengelolaan data dan informasi geospasial, digunakan untuk memotret capaian / realisasi implementasi 3 buah Perka dalam hal pengelolaan data ditambah dengan survei kepuasan pengguna internal; dan
- c. Kualitas layanan penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial digunakan untuk Memotret capaian/realisasi dari parameter kemudahan akses dari InaGeoportal (jumlah akses dan jumlah pemanfaatan data (download)) serta parameter kepuasan pengguna dari 3 aplikasi (Ina-Geoportal, Portal KSP dan PetaKita) yang memberikan layanan terkait IG.

Tabel 3. 13 Capaian Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG

No.	Indikator Pembentuk	Target	Realisasi
1.	Indeks kualitas layanan <i>data center</i>	8 Indeks (Skala 1-10)	9,78 Indeks (Skala 1-10)
2.	Indeks kualitas layanan pengelolaan data informasi geospasial	8 Indeks (Skala 1-10)	8,95 Indeks (Skala 1-10)
3.	Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial	8 Indeks (Skala 1-10)	8,44 Indeks (Skala 1-10)
<b>Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG</b>		(9,78+8,95+8,44)/3	<b>9,06 Indeks</b>

Indeks yang mengukur kualitas layanan *data center* dihitung dengan menjumlahkan nilai capaian parameter-parameter sebagai berikut:

1. Parameter spesifikasi teknis data center yang mengacu pada standar SNI 8799-1:2019 yang meliputi spesifikasi gedung, spesifikasi kelistrikan, spesifikasi sistem pendingin, spesifikasi sistem pemadam kebakaran, dan spesifikasi keamanan akses fisik. Parameter spesifikasi teknis data center diberikan bobot 2 dari 10 dikarenakan parameter ini merupakan dasar dari infrastruktur *data center* yang harus dibangun.
2. Parameter manajemen layanan *data center* yang mengacu pada standar ISO 20000-1:2018 yang meliputi operasional *data center*, manajemen layanan, dan kompetensi pengelola layanan *data center*. Parameter ini diberikan bobot 7 dari 10 dikarenakan untuk menjamin layanan data center tetap bisa beroperasi selama 24 jam x 7 hari, dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan *data center*.
3. Parameter keamanan informasi *data center* yang mengacu pada standar ISO 27001:2013 yang meliputi jumlah persentase keamanan informasi yang dapat ditangani. Parameter keamanan informasi *data center* diberikan bobot 1 dikarenakan menjamin keamanan layanan data center.



### III.2.4 Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Sasaran strategis yang terakhir untuk mengakomodir tujuan yang akan dicapai BIG dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional. Dalam konteks penyelenggaraan informasi geospasial, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik memberi makna bahwa efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan informasi geospasial menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan secara konsisten. Hal ini akan berkorelasi langsung terhadap tingkat kinerja penyelenggaraan informasi geospasial nasional secara umum dan kinerja BIG secara khusus. Prinsip reformasi birokrasi juga menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan segenap sumber daya di BIG. Hal ini akan mencerminkan keinginan BIG untuk menjadi institusi yang bersih dan terpercaya.

Nilai reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dijadikan IKU untuk melihat keberhasilan dari sasaran strategis ini. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process* dan sumber daya manusia aparatur, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

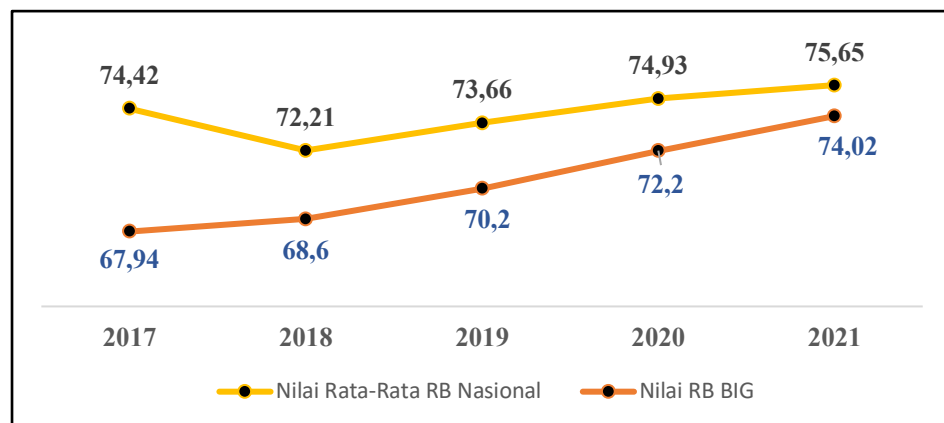
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022

SS 4 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya				
IKU Nilai Reformasi Birokrasi BIG				
Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2022	Capaian 2021
Nilai RB	76	74,02	97,39%	96,27%

Sesuai dengan formulasi perhitungan dalam dokumen manual IKU bahwa realisasi nilai RB BIG tahun 2022 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB pada tahun sebelumnya. Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BIG dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan BIG.

Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/63/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, bahwa nilai RB BIG adalah sebesar 74,02 atau ke dalam kategori BB dengan rata-rata nilai RB nasional Kementerian/Lembaga sebesar 75,65. Nilai RB BIG ini memang mengalami peningkatan jika dengan dibandingkan penilaian di tahun 2020 yaitu sebesar 72,2. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, nilai RB BIG masih dibawah rata-rata nasional.



Gambar 3. 16 Perkembangan Nilai RB BIG Tahun 2017-2021

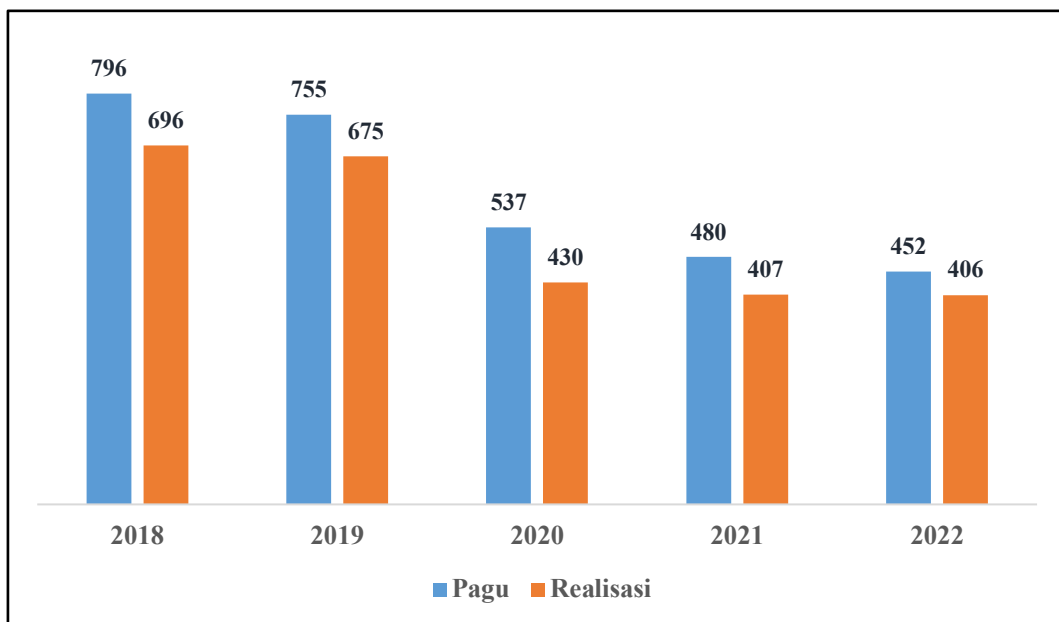
Badan Informasi Geospasial terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB. Beberapa upaya yang telah dilakukan BIG untuk terus meningkatkan implementasi RB adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2020-2024 yang telah disahkan menjadi Keputusan Kepala BIG Nomor 22 Tahun 2021;
2. Mengoptimalkan peran *Agent of Change* (AoC) yang telah dibentuk sejak tahun 2015 untuk menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis, dengan cara membuat rencana kerja AoC pada setiap Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II ;
3. Deregulasi untuk memperpendek rantai birokrasi khususnya peraturan perundang-undangan bidang IG mengikuti skema *omnibus law* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021;
4. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penetapan, monitoring dan evaluasi kinerja. Perumusan indikator kinerja sudah sesuai dengan kaidah SMART dan diturunkan (*cascade*) secara berjenjang disertai dengan pembuatan rencana aksi yang selaras;
5. Optimalisasi pengendalian internal dengan mendorong setiap UKE II melakukan identifikasi risiko dan antisipasi benturan kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja secara efektif;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara efektif setiap triwulan sehingga para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya dapat memantau target kinerja yang telah ditetapkan;
7. Melakukan revisi IKU yang masih berorientasi *output* menjadi *outcome* sehingga nilai kemanfaatan BIG sebagai instansi pemerintah dapat dirasakan oleh *stakeholders*;
8. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) unit yang telah memiliki predikat WBK, sehingga akan mengusulkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) baru menjadi 7 (tujuh) UKE II pada tahun 2023,;
9. Penyederhanaan birokrasi dengan memangkas 90% Jabatan Administrator (Eselon III) dan menghilangkan Jabatan Pengawas (Eselon IV); dan

10. Pelaksanaan sistem merit secara menyeluruh dalam menentukan perencanaan dan pengembangan karir SDM BIG sehingga didapatkan entitas organisasi yang kompeten dan profesional.

### III.3 Kinerja Anggaran

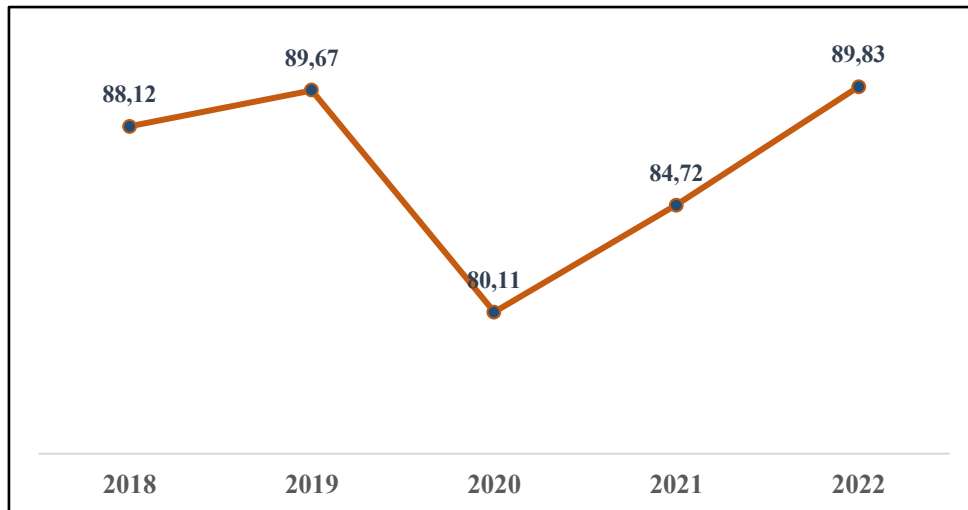
Sebagai bagian dari entitas pemerintah, BIG menjalankan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan di bidang informasi geospasial menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2022, BIG mendapatkan pagu alokasi awal sebesar Rp495.119.418.000. Terjadinya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik sehingga perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2022, sehingga pagu akhir yang dikelola oleh BIG adalah sebesar Rp452.245.199.000.



Gambar 3. 17 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

Realisasi anggaran BIG tahun 2022 adalah sebesar Rp406.248.130.224,- atau 89,83%, mengalami kenaikan sebesar 5,21% dibandingkan tahun 2021. Penyerapan anggaran BIG tahun 2022 dapat dikatakan belum optimal dan tidak sesuai dengan

target. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan pada tingkat nasional. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. 18 Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, BIG melakukan 2 (dua) kali perubahan/revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk fokus pada pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 melalui skema *automatic adjustment*. Rincian pelaksanaan revisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA BIG 2022 *automatic adjustment* tahap I untuk menindaklanjuti surat Menkeu No. S-1088/MK.02/2021 dalam rangka rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Pagu alokasi BIG menjadi Rp489.143.418.000 dengan sumber anggaran yang berasal dari Belanja Tunjangan Kinerja (Tunkin) yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR BIG TA.2022 melalui surat usulan No. B-9.4/SESMA-BIG/PR.01.03/12/2021; dan
2. Revisi DIPA BIG 2022 *automatic adjustment* tahap II untuk menindaklanjuti surat Menkeu No. S-458/MK.02/2022 dalam rangka dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN. Pagu alokasi BIG menjadi Rp452.245.199.000 dengan sumber anggaran yang berasal dari belanja barang dan belanja modal yang belum dilaksanakan dan dikontrakkan melalui surat usulan No. B-31.4/SESMA-BIG/PR.01.03/5/2022;

Selain untuk menjalankan amanah terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pencadangan anggaran (*automatic adjustmen*), pelaksanaan revisi DIPA BIG bertujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja baik dalam bentuk realisasi fisik dan realisasi anggaran, serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang terbatas.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diimplementasikan pada T.A. 2021 oleh setiap K/L memiliki tujuan untuk mewujudkan kebijakan *money follows program* dan memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja. Pelaksanaan RSPP di BIG memberikan manfaat terkait fleksibilitas penggunaan anggaran yang tidak terpaku hanya pada salah satu UKE II saja. Sehingga setiap unit kerja di BIG dapat mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Beberapa kegiatan pada Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh lintas UKE II baik dalam satu UKE I maupun UKE I lain.

Tabel 3. 15 Pagu dan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2022 per Kegiatan

Program	Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
DM <sup>1</sup>	3538	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	1.905.787.000	1.681.909.092	88,25
	3539	Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	11.727.479.000	10.908.204.986	93,01
	6450	Penyelenggaraan Kesekretariatan	151.340.226.000	144.513.266.190	95,49
PIG <sup>2</sup>	6445	Penyediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia	74.469.537.000	60.930.836.385	81,82
	6446	Penyediaan Peta Dasar	81.638.347.000	72.136.722.018	88,36
	6447	Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	26.725.505.000	25.018.644.486	93,61
	6448	Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	98.462.318.000	89.298.830.941	90,69
	6449	Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial	5.976.000.000	1.759.716.126	29,45
Total			452.245.199.000	406.248.130.224	89,83

Keterangan:

<sup>1</sup> Penyelenggaraan Informasi Geospasial

<sup>2</sup> Dukungan Manajemen

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BIG dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022, yaitu:

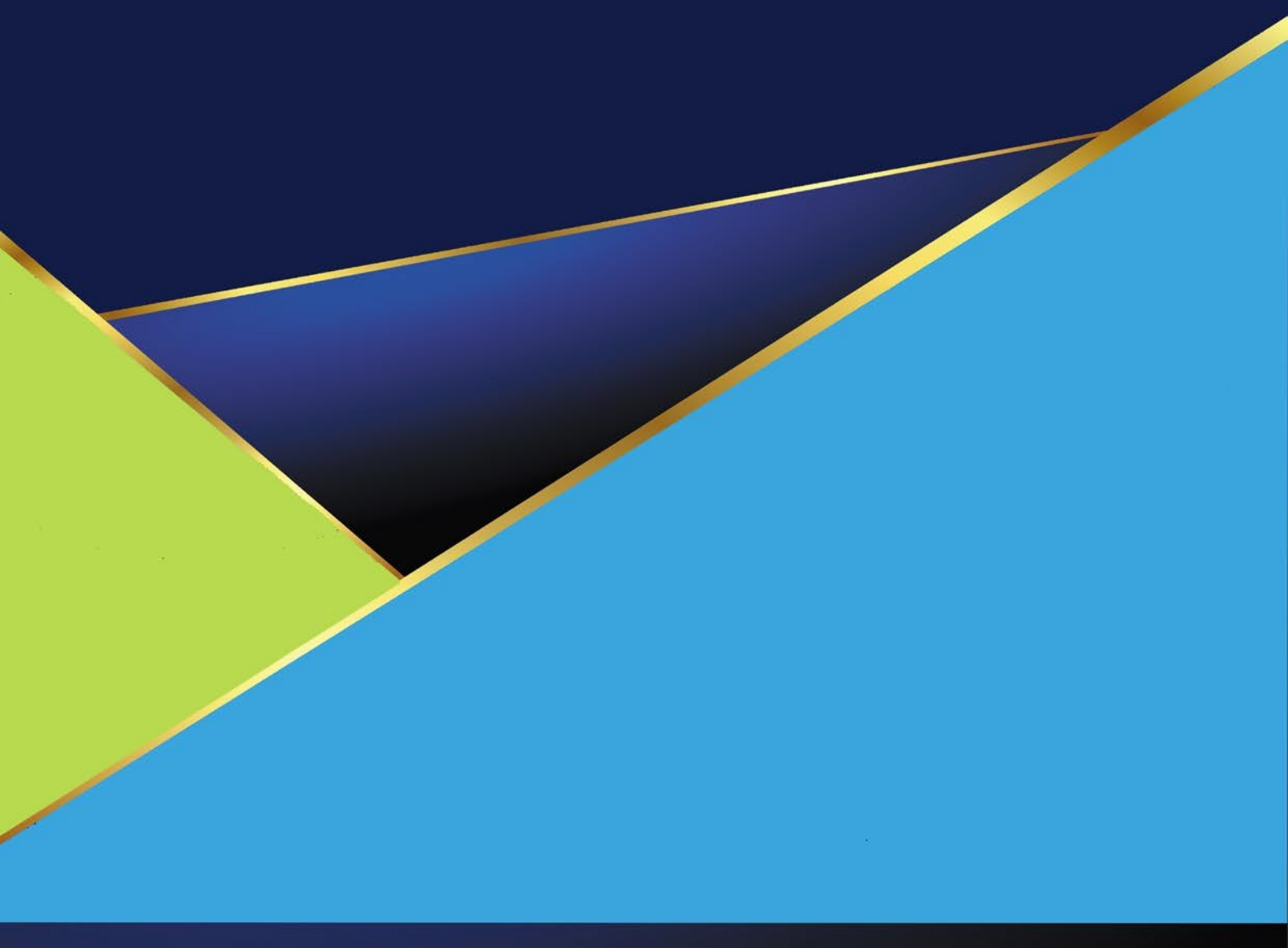
1. Pemblokiran anggaran pada DIPA BIG sebesar 55% dari total pagu sejak awal tahun 2022 membuat beberapa kegiatan menjadi mundur pelaksanaannya;
2. Terjadinya gagal lelang pada beberapa kegiatan kontraktual sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Penerimaan PNBK tahun 2022 yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, sehingga memengaruhi realisasi anggaran secara keseluruhan;
4. Penyesuaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat karena membutuhkan revisi informasi kinerja melalui Bappenas dan Kemenkeu c.q. DJA; dan
5. Penerapan RSPP yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara baik dan efektif, sehingga masih ada keraguan dalam menilai kesesuaian suatu RO untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Informasi Geospasial.

Selain itu, BIG senantiasa melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses perencanaan anggaran telah menggunakan kaidah RSPP sehingga program dan kegiatan yang dilakukan tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi UKE I dan II tetapi lebih fokus pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai BIG;
2. Proses penyusunan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan menggunakan prinsip *performance based budgeting* sehingga dapat terlihat keterkaitan dengan sasaran program hingga sasaran strategis;
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin dalam periode triwulan dengan melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
4. Peningkatan peran SPIP, dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang berisiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya;
5. Pembatasan revisi DIPA dan POK untuk menjaga kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
6. Perbaikan dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi secara intensif antara APIP dengan unit kerja terkait.

# BAB 4

## PENUTUP





## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari BIG kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat terhadap pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Laporan kinerja ini menyajikan keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2022 dan perkembangan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai kerangka kerja Rencana Strategis (Renstra) BIG 2020-2024.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan BIG No. 1 Tahun 2021 tentang Renstra BIG 2020-2024 dan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta periode kedua penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Tantangan dan kendala yang BIG hadapi dalam mengimplementasikan beberapa hal tersebut, dibuktikan dengan pencapaian kinerja yang selalu meningkat sejak tahun 2020.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran BIG dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. Secara umum, nilai capaian kinerja BIG tahun 2022 mencapai 107,69%, dapat dikatakan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja. Meskipun masih terdapat 1 (satu) IKU yang masih belum tercapai, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi. Hal tersebut menjadikan BIG senantiasa melakukan perbaikan mulai dari proses perencanaan, implemmentasi dan evaluasi kinerja. Sehingga pada tahun berikutnya semua target kinerja dapat tercapai.

Laporan Kinerja BIG tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja BIG dalam periode satu tahun. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BIG secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas, serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BIG pada tahun-tahun berikutnya..



## **BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor. 16911

Telp. 021-8752062 / 8752063; Fax: 021-8752064; Website: [www.big.go.id](http://www.big.go.id)

e-mail: [info@big.go.id](mailto:info@big.go.id) ; Facebook: [infogeospasial](https://www.facebook.com/infogeospasial) ; Twitter: [@infogeospasial](https://twitter.com/infogeospasial)

Instagram: [@infogeospasial](https://www.instagram.com/infogeospasial) ; Youtube: Badan Informasi Geospasial

**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**